



2026

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN I

DIREKTORAT PENGOLAHAN

DIREKTORAT JENDERAL
PENGUATAN DAYA SAING
PRODUK KELAUTAN DAN
PERIKANAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Triwulan I Direktorat Pengolahan Tahun 2026 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas organisasi kepada instansi terkait dan publik atas amanat dan tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada KKP.

Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan, Ditjen PDSPKP Triwulan I Tahun 2026 sebagai wujud pertanggungjawaban kepada stakeholders sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini merupakan media akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban sebagai amanah yang diemban organisasi dan tanggung jawab pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi. Di samping itu, informasi perihal pengelolaan kegiatan dan sasaran organisasi diuraikan dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Landasan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan, Ditjen PDSPKP Triwulan I Tahun 2026 adalah Rancangan Rencana Strategis Ditjen PDSPKP Tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 beserta realisasinya. Laporan ini memuat pula pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Pengolahan, Ditjen PDSPKP.

Kegiatan utama Direktorat Pengolahan yang mendukung program utama Ditjen PDSPKP yaitu, (a) Persentase Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan (%), (b) Volume Produksi Olahan Perikanan (Juta Ton), (c) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pengolahan (%), (d) Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Direktorat Pengolahan (%), (e) Nilai Pemenuhan Mandiri SAKIP Direktorat Pengolahan (Nilai), (f) Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengolahan (Indeks), (g) Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Pengolahan (Nilai). Nilai Capaian Organisasi pada periode pelaporan Triwulan I Tahun 2026 sebesar 104,63% (kategori baik). Kami berharap agar laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai media pertanggungjawaban kepada stakeholders dan pemacu peningkatan kinerja bagi organisasi Direktorat Pengolahan, Ditjen PDSPKP.

Terima kasih kami sampaikan semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca untuk memperkaya pengetahuan tentang pengolahan dan bina mutu di sektor kelautan dan perikanan. Laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam rangka perbaikan dan penyusunan kegiatan Direktorat Pengolahan selanjutnya. Namun kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kami mengharapkan saran dan masukan konstruktif dari pihak-pihak terkait sebagai bahan perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan yang akan datang. Saran dapat disampaikan melalui email: direktoratpbn@gmail.com. Demikian atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Jakarta, 20 April 2026

Direktur Pengolahan



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Ir. Tri Aris Wibowo, M.Si

Tim Penyusun

PENGARAH

Direktur Pengolahan

PENYUSUN

Tim penyusunan pelaporan Direktorat Pengolahan

KONTRIBUTOR

Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja Lingkup Direktorat Pengolahan,
Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan Triwulan I Tahun 2026 disusun sebagai bentuk laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kinerja (*performance results*) Direktorat Pengolahan selama Triwulan I Tahun 2026, dikaitkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) tahun 2025 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029. Sesuai dengan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026, Direktorat Pengolahan melakukan pengukuran terhadap kegiatan Pengolahan yang tercakup dalam program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan untuk mencapai 7 (tujuh) Indikator Kegiatan (IK) sebagai berikut: (a) Persentase Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan (data), (b) Volume Produksi Olahan Perikanan (Juta Ton), (c) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pengolahan (%), (d) Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Direktorat Pengolahan (%), (e) Nilai Pemenuhan Mandiri SAKIP Direktorat Pengolahan (Nilai), (f) Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengolahan (Indeks), (g) Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Pengolahan (Nilai).

Sasaran kegiatan di atas selanjutnya ditetapkan dalam bentuk kontrak kinerja antara Direktur Pengolahan dengan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan terdiri dari 7 (tujuh) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dengan rincian 3 indikator kinerja bersifat tahunan, 3 indikator kinerja bersifat semesteran, dan 1 indikator kinerja bersifat triwulanan.

Indikator Kinerja Kegiatan yang bersifat tahunan Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Direktorat Pengolahan, Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Pengolahan, Sedangkan indikator yang bersifat triwulan adalah Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkup Direktorat Pengolahan, Indikator yang bersifat semesteran adalah Persentase Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan, Volume Produksi Olahan Perikanan, Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Pengolahan.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan atas capaian dan akuntabilitas kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, tujuh (7) Indikator Kegiatan (IK) dan

Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Pengolahan mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan aplikasi kinerjaku, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada periode pelaporan Triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar 104,63% (kategori baik). Nilai tersebut diperoleh dari capaian kinerja yang targetnya ada pada Triwulan I Tahun 2026. Adapun rincian yaitu sebagai berikut :

- IKK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pengolahan (%); target 95%; capaian 99,40% atau 104,63% dari target.

Berdasarkan surat dari Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-1104/AG/AG.3/2025 tanggal 24 Desember 2025 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan serta berdasarkan Perjanjian Kinerja tertanggal 6 Januari 2026, Direktorat Pengolahan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 5.943.502.000,- dengan realisasi sampai dengan Maret 2026 sebesar Rp 971.611.545,- atau setara dengan 16,35%. Pencapaian terhadap target sasaran kinerja bidang Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan yang telah dicapai selama Triwulan I Tahun 2026 serta penyelesaian permasalahan yang dihadapi, diharapkan dapat menjadi salah satu acuan untuk merumuskan langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan di tahun selanjutnya. Dengan melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2026 dan analisis yang komprehensif terhadap capaian sasaran yang dijabarkan dalam indikator-indikator utama yang telah dicapai di Triwulan I Tahun 2026, diharapkan dapat dijadikan umpan balik dan acuan perencanaan berikutnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
Tim Penyusun	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Maksud dan Tujuan.....	2
1.3.Tugas dan Fungsi	2
1.4.Keragaan Sumberdaya Manusia.....	3
1.5.Permasalahan Utama	4
1.6.Sistematika Penyajian.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	7
2.1.Rencana Strategis	7
2.2.Perjanjian Kinerja Tahun 2026	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	11
3.1.Nilai Kinerja Organisasi Pada Periode Pelaporan Tahun Berjalan	11
3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja	13
Meningkatnya Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan	13
IK 1. Persentase Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan	13
Meningkatnya Produksi Olahan Kelautan dan Perikanan.....	31
IK 2. Volume Produksi Olahan Perikanan.....	31
Terlaksananya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya lingkup Direktorat Pengolahan	53
IK 3. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pengolahan	53
IK 4. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Direktorat Pengolahan	54
IK 5. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Pengolahan.....	55
IK 6. Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengolahan	56
IK 7. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Pengolahan.....	57

3.3. Realisasi Anggaran	58
BAB IV PENUTUP.....	60
4.1.Kesimpulan	60
4.2. Permasalahan dan Rekomendasi	60
4.3. Tindak Lanjut Rekomendasi Pada Laporan Kinerja Triwulan Sebelumnya Tahun 2025	61
4.4. Lampiran	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Direktorat Pengolahan Tahun 2026	9
Tabel 2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Direktorat Pengolahan Tahun 2026	12
Tabel 3. Ikhtisar Pencapaian Persentase Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan	13
Tabel 4. Ikhtisar Pencapaian Volume Produksi Olahan Perikanan	32
Tabel 5. Ikhtisar Pencapaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pengolahan	53
Tabel 6. Ikhtisar Pencapaian Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Direktorat Pengolahan.....	54
Tabel 7. . Ikhtisar Pencapaian Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Pengolahan	55
Tabel 8. Ikhtisar Pencapaian Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengolahan....	57
Tabel 9. Ikhtisar Pencapaian Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Pengolahan	58
Tabel 10. Realisasi Anggaran Direktorat Pengolahan Triwulan I 2026	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Organisasi Direktorat Pengolahan	3
Gambar 2. Keragaan Sumber Daya Manusia	4
Gambar 3. Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2026	6
Gambar 4. Layar tangkap dashboard nilai capaian Tahun 2025 Direktorat Pengolahan pada aplikasi kinerjaku	11
Gambar 6. Persiapan Kegiatan Penghitungan Susut Hasil Perikanan Tahun 2026 .	16
Gambar 7. Koordinasi Penghitungan Susut Hasil	17
Gambar 8. Pembahasan Rencana Pelaksanaan Pendataan VPO Unit Pengolahan Ikan (UPI) Tahun 2025 dan 2026.....	18
Gambar 9. Penetapan Populasi Unit Pengolahan Ikan (UPI) Skala Mikro dan Kecil Tahun 2025	19
Gambar 10. Pembinaan Penerapan Kelayakan Pengolahan dan Penerapan HACCP	21
Gambar 11. Rapat Pembahasan Kurikulum dan GBPP Corporate University.....	22
Gambar 12. Pembinaan SKP dan HACCP untuk UMKM Naik Kelas	23
Gambar 13. Bimbingan Teknis Pembinaan Mutu dan Usaha Pengolahan	24
Gambar 14. Pembahasan modul penanganan pasca panen dalam rangka operasional Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP).....	25
Gambar 15. Rapat Pembahasan Instrumen Audit Internal HACCP bagi UMKM	25
Gambar 16. Rapat Koordinasi Pembinaan dan Sertifikasi SKP	26
Gambar 17. Rapat Pembahasan SK Tim ISO 9001:2015 lingkup Direktorat Pengolahan.....	27
Gambar 18. Pembinaan Kelayakan Pengolahan untuk KNMP	28
Gambar 19. Rapat Pembahasan Struktur Pengurus ASMI	29
Gambar 20. Pembinaan Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan Skala Menengah dan Besar yang Dibina	30
Gambar 21. Webinar dengan tema “ <i>Manajemen Alergen pada Unit Pengolahan Ikan (UPI)</i> ”	31
Gambar 22. Rapat Koordinasi dengan Anggota Komite Teknis 65-05: dan Komite Teknis 65-08.....	34
Gambar 23. Rapat Penguatan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Perikanan	35
Gambar 24. Rapat Refreshment Penyusunan RSNI 2026	36
Gambar 25. Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Permohonan Peninjauan Ulang SNI 8222:2022 Produk Mackerel Kaleng Dengan Bahan Baku Jack Mackerel (Trachurus murphyi)	37
Gambar 26. Rapat Penyusunan Konsep (RSNI1) Ekstrak Cair Spirulina	37
Gambar 27. Rapat Persiapan RSNI Filet Patin	38
Gambar 28. Workshop Diversifikasi dan Nilai Tambah edisi Gyoza Tilapia bersama Satker Mataram.....	39

Gambar 29. Workshop Diversifikasi dan Nilai Tambah Edisi Shimp Roll bersama Satker Palabuhan Ratu	40
Gambar 30. Workshop Diversifikasi dan Nilai Tambah Edisi Es Kopyor Rumut Laut bersama Satker Ambon	40
Gambar 31. Kegiatan Ngolah Ikan Bersama Gen Z Politeknik KP Dumai.....	41
Gambar 32. Pengenalan Produk UMKM Kelautan dan Perikanan kepada SPPG ...	41
Gambar 33. Pembinaan Diversifikasi Produk Bernilai Tambah Non Pangan melalui Kunjungan Lapang yang dilaksanakan selama periode Triwulan I	42
Gambar 34. Rapat Penguatan Produk Non Pangan Sebagai Tindak Lanjut atas Hasil Kunjungan Lapangan di CV. Shaany Inovasi Berkah	43
Gambar 35. Pembahasan Teknis Pendataan Dan Koordinasi Pengisian Kuisisioner UPHPN.....	44
Gambar 36. Webinar bertema “Waste to Value – Solutions for Shrimp By-Products”	45
Gambar 37. Rapat Review SOP Pembinaan Pengolahan	46
Gambar 38. Rapat Koordinasi Verifikasi Data Pelaku Usaha Pascabencana Sumatera.....	47
Gambar 39. Rapat Koordinasi Sinkronisasi Data Pelaku Pengolahan Perikanan	48
Gambar 40. Pembinaan Unit Pengolahan Ikan (UPI) Skala Menengah dan Besar..	49
Gambar 41. Pembinaan Hasil Uji Laboratorium Produk Pindang dan Pendampingan pemenuhan SNI PT. Hidayat Bahari Sejahtera (PT. HBS).....	50
Gambar 42. Workshop Pendampingan Proses Produk Halal (P3H)	51
Gambar 43. Pembinaan dan Pendampingan Izin Edar MD CV. Cindy Group	52
Gambar 44. Klinik Mutu pada Bazar Perikanan KKP	53

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, profesional dan bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan hal yang tidak dapat kita hindarkan di era reformasi. Reformasi birokrasi merupakan perwujudan responsibilitas dan sensitifitas pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara. Direktorat Pengolahan merupakan direktorat teknis di bawah Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang bertanggung jawab kepada Dirjen PDSPKP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mengacu kepada Perjanjian Kinerja yang mengejawantahkan dari Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025 - 2029 yang disusun sebagai acuan kegiatan dalam kurun waktu periode lima tahunan. Mendukung hal tersebut, Direktorat Pengolahan turut serta menyusun Perjanjian Kinerja yang mencakup turunan dari Renstra 2025-2029 dengan Indikator Kinerja Utama yaitu, (a) Persentase Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan (%), (b) Volume Produksi Olahan Perikanan (Juta Ton), (c) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pengolahan (%), (d) Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Direktorat Pengolahan (%), (e) Nilai Pemenuhan Mandiri SAKIP Direktorat Pengolahan (Nilai), (f) Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengolahan (Indeks), (g) Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Pengolahan (Nilai). Berdasar pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat Pengolahan sebagai Entitas Akuntabilitas Kinerja berkewajiban menyusun perjanjian kinerja, melakukan pengukuran kinerja dan pengelolaan data kinerja, serta menyampaikan Laporan Kinerja yang merupakan wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban. Upaya mewujudkan akuntabilitas organisasi Direktorat Pengolahan Menyusun laporan Kinerja baik secara periodik triwulan maupun tahunan. Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban organisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan pada indikator sasaran yang telah

ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut, maka Direktorat Pengolahan akan menyampaikan capaian realisasi kinerja dari setiap pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2026 dengan menyusun “Laporan Kinerja Triwulan I Direktorat Pengolahan Tahun 2026”.

1.2.Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2026 adalah:

1. Untuk melaporkan pertanggung jawaban kinerja kepada pemerintah dan publik;
2. Sarana evaluasi atas capaian kinerja dalam melaksanakan visi dan misinya, serta sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

1.3.Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 02/PERMENKP/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Pengolahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengolahan hasil kelautan dan perikanan. Sebagai upaya dalam pelaksanaan tugas tersebut, Direktorat Pengolahan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pemetaan dan analisis pengolahan hasil kelautan dan perikanan, pengembangan dan penerapan standardisasi, diversifikasi dan inovasi produk bernilai tambah, dan pembinaan pengolahan hasil kelautan dan perikanan, serta pembinaan mutu, keamanan, dan kualitas produk kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemetaan dan analisis pengolahan hasil kelautan dan perikanan, pengembangan dan penerapan standardisasi, diversifikasi dan inovasi produk bernilai tambah, dan pembinaan pengolahan hasil kelautan dan perikanan, serta pembinaan mutu, keamanan, dan kualitas produk kelautan dan perikanan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemetaan dan analisis pengolahan hasil kelautan dan perikanan, pengembangan dan penerapan standardisasi, diversifikasi dan inovasi produk bernilai tambah, dan pembinaan pengolahan hasil kelautan dan perikanan, serta pembinaan mutu, keamanan, dan kualitas produk kelautan dan perikanan;

- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemetaan dan analisis pengolahan hasil kelautan dan perikanan, pengembangan dan penerapan standardisasi, diversifikasi dan inovasi produk bernilai tambah, dan pembinaan pengolahan hasil kelautan dan perikanan, serta pembinaan mutu, keamanan, dan kualitas produk kelautan dan perikanan;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemetaan dan analisis pengolahan hasil kelautan dan perikanan, pengembangan dan penerapan standardisasi, diversifikasi dan inovasi produk bernilai tambah, dan pembinaan pengolahan hasil kelautan dan perikanan, serta pembinaan mutu, keamanan, dan kualitas produk kelautan dan perikanan; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Pengolahan.

Berdasarkan Surat Tugas Nomor B.1010/DJPDSPKP.4/KP.440/X/2025, Direktorat Pengolahan dipimpin oleh seorang Direktur yang membawahi 6 Tim Kerja dan 1 Kepala Subbagian Tata Usaha, sebagai berikut :

- a. Tim Kerja Pemetaan dan Analisis Pengolahan;
- b. Tim Kerja Pengembangan dan Penerapan Standar Produk;
- c. Tim Kerja Diversifikasi dan Inovasi Produk Pangan ;
- d. Tim Kerja Diversifikasi dan Inovasi Produk Non Pangan;
- e. Tim Kerja Pembinaan Pengolahan Hasil;
- f. Tim Kerja Pembinaan Mutu dan Keamanan Produk;
- g. Kepala Subbagian Tata Usaha.

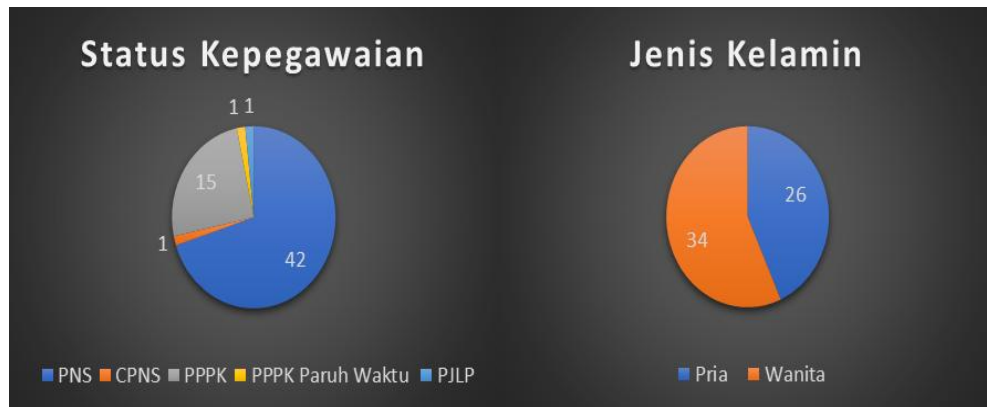


Gambar 1. Bagan Organisasi Direktorat Pengolahan

1.4. Keragaan Sumberdaya Manusia

Jumlah pegawai di Direktorat Pengolahan pada Tahun 2026 berjumlah 60 orang dengan komposisi 42 orang PNS, 1 orang CPNS, 15 orang PPPK, PPPK Paruh Waktu 1 orang, dan 1 orang PJLP. Jumlah komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin terdiri dari Pria sebanyak 26 orang dan Wanita sebanyak 34 orang. Sedangkan berdasarkan jabatan fungsional, jumlah Analis Mutu Hasil Perikanan Pertama sebanyak 1, Analis

Pasar Hasil Perikanan Pertama sebanyak 9 orang, Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebanyak 27 orang, Penata Perizinan sebanyak 1 orang, Penata Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan sebanyak 1 orang, Pranata Keuangan APBN Terampil sebanyak 1 orang, Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur sebanyak 1 orang.



Gambar 2. Keragaan Sumber Daya Manusia

1.5. Permasalahan Utama

Dalam pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, terdapat berbagai tantangan kompleks yang saling berkaitan dan memerlukan penanganan secara menyeluruh. Salah satu isu utama adalah produk perikanan yang mudah rusak sehingga membutuhkan penanganan ekstra untuk mempertahankan nilai dan mutunya. Penyediaan bahan baku yang memenuhi persyaratan ekspor menjadi keharusan dalam peningkatan kinerja ekspor perikanan. Pembinaan terhadap UPI perlu diperkuat, terutama dalam penyediaan produk yang berkualitas, diversifikasi bentuk penyajian produk, pelaksanaan pengujian mutu secara bertingkat, serta optimalisasi penerapan sistem ketertelusuran produk perikanan. Selain itu, untuk menjamin keamanan produk perikanan yang diperdagangkan, penilaian dan sertifikasi mutu perlu ditingkatkan, khususnya untuk UPI, pelaku pasar, dan pelaku logistik. Penguatan aspek kelembagaan dan peningkatan investasi pada sektor pengolahan dan pemasaran juga menjadi bagian penting yang harus dikembangkan untuk mendukung ekosistem bisnis kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Di samping tantangan teknis tersebut, rendahnya literasi keuangan pelaku usaha perikanan, khususnya UPI skala mikro dan kecil, menjadi hambatan signifikan dalam pengelolaan usaha secara berkelanjutan.

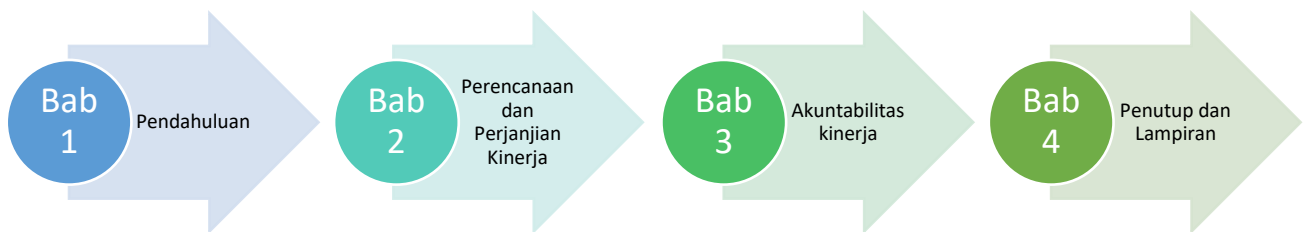
Terkait produk perikanan yang mudah rusak (*perishable product*), perlu dilakukan penanganan ekstra untuk mempertahankan nilainya. Penyediaan bahan baku yang memenuhi persyaratan ekspor menjadi kewajiban dalam peningkatan ekspor perikanan.

Ke depan, pembinaan terhadap UPI dalam penyediaan produk perikanan yang berkualitas perlu diperkuat, begitu juga diversifikasi produk pengujian mutu perlu dilakukan bertingkat, serta implementasi sistem ketertelusuran untuk menjamin kepercayaan dan transparansi rantai pasoknya. Di samping itu, sebagai upaya untuk memastikan keamanan produk perikanan yang diperdagangkan, penilaian dan sertifikasi perlu terus ditingkatkan, terutama untuk UPI, pelaku pasar dan logistik perikanan sehingga mempunyai jangkauan pasar yang luas. Tantangan berikutnya terjadi pada industri pengolahan ikan, dimana saat ini masih didominasi UPI berskala mikro kecil. Jumlahnya mencapai 76.318 unit, sementara UPI skala menengah dan besar hanya 1.480 unit (Direktorat Pengolahan, 2025). Akibatnya mereka kurang bisa bersaing terutama dalam pemodalan dan ekspansi usaha, meskipun kebijakan berpihak kepada mereka. Ke depan, UPI skala mikro kecil tersebut perlu dibina dan difasilitasi sehingga lebih berkembang dan meningkat kelasnya. Hal ini perlu dilakukan antara lain dengan memperbanyak inkubator bisnis produk KP yang nantinya bisa melatih UPI dalam pengembangan produk dan memfasilitasi UPI untuk naik kelas. Upaya berikut perlu dilakukan adalah untuk menjamin keamanan produk perikanan yang diperdagangkan, penilaian dan sertifikasi mutu perlu ditingkatkan, khususnya untuk UPI, pelaku pasar, dan pelaku logistik.

Pembina Mutu dan Analis Pasar Hasil Perikanan akan menjembatani penyediaan produk kelautan dan perikanan yang berkualitas dengan jaringan logistik dan pasar potensial di dalam dan luar negeri. Dalam konteks pengembangan SDM pengolahan, pelaku UPI perlu diberikan pengetahuan berkaitan dengan standar mutu (GMP, SSOP, HACCP, *Traceability*) dan informasi pasar sehingga terjadi konsistensi dalam penyediaan produk kelautan dan perikanan berkualitas yang dibutuhkan pasar. Pembina Mutu dan Analis Pasar Hasil Perikanan membantu hal tersebut di lapangan, sementara pada lingkup yang lebih luas, Ditjen PDSPKP dapat mengakomodasi melalui pengembangan sertifikasi kesesuaian mutu, fasilitasi prasarana dan sarana pengolahan, penyimpanan, distribusi, dan pemasaran, fasilitasi promosi dan pameran produk kelautan dan perikanan, serta fasilitasi kesepakatan pemasaran produk kelautan dan perikanan di pasar potensial dalam dan luar negeri.

1.6.Sistematika Penyajian

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan Triwulan I Tahun 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini merupakan dokumen informasi pelaksanaan program dan kegiatan dan pencapaian kinerja Direktorat Pengolahan selama Triwulan I Tahun 2026. Pencapaian Kinerja (*Performance Results*) Tahun 2026 yang terealisasi dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) Tahun 2026 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja akan memungkinkan identifikasi sejumlah kesenjangan kinerja (*Performance Gap*) untuk perbaikan kinerja di masa mendatang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pengolahan Triwulan I Tahun 2026 diilustrasikan dalam bagan berikut ini :



Gambar 3. Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2026

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1.Rencana Strategis

Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan telah menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2025-2029. Rencana strategis merupakan arah organisasi dan seluruh pegawai di dalamnya untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan mandat yang diterima. Rencana strategis yang disusun berlandaskan pada visi yang telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu:

“Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”

Visi KKP, yaitu:

”Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Misi KKP :

1. Menjaga Keberlanjutan Ekosistem dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
2. Mengembangkan Sektor Kelautan dan Perikanan Sebagai Penggerak Utama Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan
3. Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Berkualitas

Tujuan KKP :

1. meningkatnya efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
2. meningkatnya produktivitas dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan secara berkelanjutan serta pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berdaya saing;
3. meningkatnya kompetensi SDM kelautan dan perikanan; dan
4. meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berkualitas.

Sedangkan Rancangan Visi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan:

“Terwujudnya Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan sebagai Pilar Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan”.

Misi DJPDS :

1. Mengakselerasi hilirisasi produk kelautan dan perikanan; dan
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berkualitas.

Tujuan :

1. Meningkatkan akses pasar produk kelautan dan perikanan di pasar dalam dan luar negeri serta usaha pengolahan dan pemasaran.

Pencapaian tujuan ini ditandai dengan:

- a. Target Indikator Nilai Ekspor Rumput Laut tahun 2025 sebesar USD 574 juta dan meningkat sebesar USD 898 juta pada tahun 2029,
 - b. Target Indikator Nilai Ekspor Perikanan lainnya tahun 2025 sebesar USD 5,68 miliar dan meningkat sebesar USD 7,60 miliar pada tahun 2029,
 - c. Target Nilai Pemasaran Produk Perikanan Dalam Negeri tahun 2025 sebesar Rp 310,51 triliun dan meningkat sebesar Rp 352,01 triliun pada tahun 2029,
 - d. Target Persentase UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan Naik Kelas tahun 2025 sebesar 5% dan meningkat sebesar 7% pada tahun 2029.
2. Mewujudkan tata kelola birokrasi yang efisien, profesional, dan berorientasi hasil dalam mendukung penguatan daya saing sektor kelautan dan perikanan. Pencapaian tujuan ini ditandai dengan:
Target Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup Ditjen PDSPKP tahun 2025 sebesar 86 dan meningkat sebesar 88 pada tahun 2029.

Sasaran Strategis :

1. SS-3 Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan di Pasar Domestik dan Internasional
2. SS-5 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas

Program :

1. Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
2. Dukungan Manajemen

Sasaran Program :

1. Meningkatnya Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan yang berdaya saing

2. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Penetapan kinerja merupakan penjabaran target kinerja yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Penetapan kinerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggung jawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Target kinerja ditetapkan untuk setiap indikator kinerja, baik untuk indikator kinerja tingkat sasaran maupun indikator kinerja tingkat kegiatan (input, output, dan outcome). Rencana kinerja yang ditetapkan pada setiap tahun merupakan rumusan yang direncanakan berdasarkan rencana strategis untuk kurun waktu 2025-2029. Uraian indikator kinerja yang dilakukan pada Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Direktorat Pengolahan Tahun 2026

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan		Target Tahun 2026
1.	Meningkatnya Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan (Persen)	68.9
2.	Meningkatnya Produksi Olahan Kelautan dan Perikanan	2	Volume Produksi Olahan Perikanan (Juta Ton)	3.83
3.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	3	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pengolahan (Persen)	95

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan		Target Tahun 2026
		4	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Direktorat Pengolahan (Persen)	100
		5	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Pengolahan (Nilai)	86,2
		6	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengolahan (Indeks)	81,5
		7	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Pengolahan	75

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Nilai Kinerja Organisasi Pada Periode Pelaporan Tahun Berjalan

Direktorat Pengolahan memiliki 7 indikator kinerja yang terdiri dari rincian 3 indikator kinerja bersifat tahunan, 3 indikator kinerja bersifat semesteran, dan 1 indikator kinerja bersifat triwulanan. Nilai pencapaian NKO Direktorat Pengolahan berdasarkan aplikasi kinerjaku pada Triwulan I Tahun 2026 sebesar 104,63. Jika dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun 2025 adanya penurunan 0,46 poin atau 0,44%, dan jika dibandingkan dengan capaian triwulan IV tahun 2025 terdapat kenaikan sebesar 2,65 poin atau 102,87%.



Gambar 4. Layar tangkap dashboard nilai capaian Tahun 2026 Direktorat Pengolahan pada aplikasi kinerjaku

Tabel 2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Direktorat Pengolahan Tahun 2026

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target		Realisasi TW I 2026	% Terhadap Target	
			Target Tahun 2026	TW I		Tahun 2026	TW I 2026
1.	Meningkatnya Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan	1 Persentase Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan (Persen)	68.90				
2.	Meningkatnya Produksi Olahan Kelautan dan Perikanan	2 Volume Produksi Olahan Perikanan (Juta Ton)	3.83			0.00	#DIV/0!
3.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	3 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pengolahan (Persen)	95.00	95.00	99,40	104.63	104.63
		4 Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Direktorat Pengolahan (Persen)	100			0	#DIV/0!
		5 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Pengolahan (Nilai)	86,2				

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target		Realisasi TW I 2026	% Terhadap Target	
			Target Tahun 2026	TW I		Tahun 2026	TW I 2026
		6 Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengolahan (Indeks)	81,5			#VALUE!	#DIV/0!
		7 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Pengolahan	75				

3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Meningkatnya Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan

IK 1. Persentase Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan

Realisasi produksi atau volume produk olahan dibandingkan dengan kapasitas terpasang pada Unit Pengolahan Ikan (UPI) Skala Menengah dan Besar. Capaian persentase utilitas pada semester 1 merupakan angka prognosa.

Tabel 3. Ikhtisar Pencapaian Persentase Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I 2026	% Realisasi s.d. TW I Terhadap Target 2026	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2026	TW IV 2025	TW I 2024	Tahun 2026	TW I 2026	TW IV 2025	TW I 2025	s.d. TW I 2026			TW IV 2025	TW I 2026
Persentase Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan	-	68,26	-	68.90	-	68.26	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan data capaian Indikator Kinerja (IK) *Persentase Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan*, belum terdapat realisasi pada Triwulan I tahun 2026. Hal ini dikarenakan mekanisme pelaporan indikator tersebut bersifat semesteran, sehingga capaiannya baru akan tersedia pada Triwulan II. Kondisi ini serupa dengan IK *Persentase Utilitas Unit Pengolahan Ikan* pada tahun 2025 yang juga belum mencatatkan capaian di triwulan pertama. Adapun target tahun 2026 mengalami peningkatan sebesar 0,64 poin menjadi 68,90%, dibandingkan target tahun 2025 yang sebesar 68,26%.

Alokasi anggaran IK Persentase Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan merupakan gabungan dari dua kegiatan (RO) mengacu pada dokumen rencana evaluasi rencana aksi yang telah ditetapkan ada dua kegiatan, yaitu Penghitungan dan Analisis Data Profil Industri Hasil Kelautan dan Perikanan, Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan Bagi Unit Penanganan dan Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan. Indikator kinerja Persentase Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan mendapatkan pagu sebesar Rp 1.120.493.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan I Tahun 2026 sebesar Rp 202.189.600,- atau sebesar 18,04% dari pagu anggaran. Dikarenakan belum terdapatnya realisasi IKU pada triwulan I dan baru akan dapat direalisasikan pada triwulan II, sehingga pada triwulan ini tidak dapat dilakukan penghitungan terhadap nilai efisiensi anggaran IK.

Faktor Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pada triwulan I adalah dalam perhitungan susut hasil perikanan terdapat beberapa metode penghitungan susut yang dilakukan oleh berbagai instansi namun belum terintegrasi dan belum memiliki metodologi baku secara nasional, dan belum terdapatnya penetapan petugas enumerator dan validator pendataan produksi tahun 2026 oleh Pusdatin. Yang menjadi faktor keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan pada triwulan I adalah telah dilakukan koordinasi dengan Tim Susut Hasil 2023 terkait sinergitas dan sinkronisasi penghitungan susut hasil perikanan tahun 2026 untuk mengetahui metode penghitungan susut hasil mengingat belum ada metodologi baku untuk menghitung susut hasil secara nasional, dan telah dilakukan koordinasi dengan Pusdatin dan Sekretariat Ditjen PDSPKP dalam rangka akselerasi pelaksanaan validasi nasional untuk penghitungan VPO tahun 2025 dan persiapan pendataan VPO tahun 2026. Rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan kedepannya, yaitu Direktorat Pengolahan akan melakukan koordinasi kembali dengan Tim Susut Hasil untuk menentukan ruang lingkup, metodologi, timeline kegiatan, dan

hal-hal terkait lainnya, dan akan melakukan koordinasi intensif dengan Pusdatin untuk mendorong percepatan penetapan petugas enumerator dan validator di tingkat Propinsi dan Kab/Kota.

Sebagai tindak lanjut atas rekomendasi triwulan sebelumnya, telah dilaksanakan Koordinasi Persiapan Pendataan dan Penghitungan VPO Tahun 2025 dan 2026 yang mencakup pembahasan rencana pelaksanaan pendataan serta penetapan populasi UPI Skala Mikro dan Kecil Tahun 2025. Langkah ini bertujuan untuk memperdalam analisis tren dan anomali data demi menjamin akurasi serta validitas penghitungan. Selain itu, telah dilaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau K/L terkait guna menyinergikan dan menyinkronkan penghitungan susut hasil perikanan tahun 2026, sekaligus mendukung pendataan *profiling* Food Loss and Waste (FLW).

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung indikator kinerja di atas antara lain :

A. Penghitungan dan Analisis Data Profil Industri Hasil Kelautan dan Perikanan

Kegiatan Penghitungan dan Analisis Data Profil Industri Hasil Kelautan dan Perikanan merupakan jumlah data dan informasi industri pengolahan hasil perikanan berupa data *losses* dan utilitas yang dihasilkan oleh Direktorat Pengolahan dalam satu periode waktu. Kegiatan ini memiliki target sebanyak 6 dokumen (Profil Pemetaan UPI, VPO MB, VPO MK, Utilitas, Susut Hasil, dan Rendemen) yang akan dicapai pada triwulan IV. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung Penghitungan dan Analisis Data Profil Industri Hasil Kelautan dan Perikanan, yaitu:

1. Persiapan Kegiatan Penghitungan Susut Hasil Perikanan Tahun 2026

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2026 dilaksanakan secara luring di R.R. Pembinaan Mutu Lt. 12A GMB 3. Kegiatan dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Pemetaan dan Analisis Pengolahan dan dihadiri oleh Plt. Kepala Pusat Kebijakan Strategis, Dr. Singgih Wibowo (BRIN), Dr. Muhamad Darmawan (BPPSDMKP), perwakilan Setditjen PDSPKP dan perwakilan tim kerja lingkup Direktorat Pengolahan. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah membahas rencana penghitungan susut hasil perikanan. Kegiatan membahas rencana penghitungan susut hasil perikanan sebagai bagian dari upaya mendukung target RPJMN 2025–2029 dalam menurunkan susut pangan. Susut hasil perikanan terjadi di seluruh rantai pasok dan berdampak signifikan terhadap kerugian ekonomi serta keberlanjutan lingkungan. Hasil penghitungan tahun 2023 menunjukkan tingkat susut yang cukup tinggi (33%)

dengan kerugian terbesar pada pedagang pengepul dan secara persentase pada pelaku pengolahan. Untuk pelaksanaan tahun 2026, penghitungan akan menggunakan metode sebelumnya sebagai dasar, dengan pembatasan ruang lingkup, pendekatan pendataan yang lebih menyeluruh dari hulu ke hilir, serta diarahkan untuk menghasilkan model atau formulasi susut hasil perikanan dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran.



Gambar 5. Persiapan Kegiatan Penghitungan Susut Hasil Perikanan Tahun 2026

2. Koordinasi Penghitungan Susut Hasil

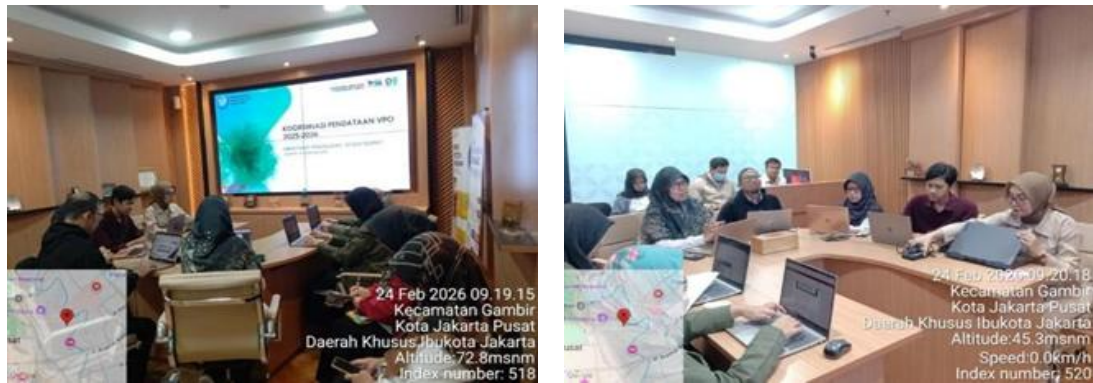
Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2026 dilaksanakan secara *hybrid* di R.R. Pembinaan Mutu Lt. 12A GMB 3. Kegiatan dipimpin oleh Katimja Pemetaan dan Analisis Pengolahan dan dihadiri oleh Plt. Kapuskajis beserta tim susut hasil 2023 yaitu Dr. Singgih Wibowo (BRIN) dan Dr. Muhamad Darmawan (BPPSDMKP), perwakilan Direktorat Statistik Sumber Daya Hayati dan Direktorat Metodologi Statistik dan Sains Data (Badan Pusat Statistik), Setditjen Perikanan Tangkap, Timja Diversifikasi dan Inovasi Produk Non Pangan serta Timja Pembinaan dan Pengolahan Hasil. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk sinergitas dan sinkronisasi penghitungan susut hasil perikanan tahun 2026 dengan unit kerja atau K/L terkait, sehubungan dengan keterbatasan sumberdaya baik SDM maupun anggaran. Disepakati bahwa penghitungan tahun 2026 perlu difokuskan dengan tujuan yang spesifik dan ruang lingkup terbatas, mencakup komoditas, rantai pasok, dan lokasi tertentu. Hasil penghitungan tidak dimaksudkan sebagai angka nasional, tetapi sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan untuk menekan susut hasil perikanan. Penghitungan direncanakan dimulai pada awal triwulan II tahun 2026, dengan mendorong keterlibatan instansi lain sesuai kewenangannya untuk melengkapi rantai pasok yang belum tercakup.



Gambar 6. Koordinasi Penghitungan Susut Hasil

3. Pembahasan Rencana Pelaksanaan Pendataan VPO Unit Pengolahan Ikan (UPI) Tahun 2025 dan 2026

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2026 dilaksanakan secara luring di R.R. Sekretariat Ditjen PDSPKP Lt. 14. Kegiatan dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Pemetaan dan Analisis Pengolahan serta dihadiri oleh perwakilan Pusat Data dan Informasi Sekjen KKP, Setditjen PDSPKP, Tim Kerja Diversifikasi dan Inovasi Produk Non Pangan, Tim Kerja Pemetaan dan Analisis Pengolahan dan PT. Bagus Harapan Tritunggal (pengembang portal data KKP). Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk mengetahui perkembangan hasil validasi nasional data VPO UPI MK semester 1 Tahun 2025, rencana pelaksanaan validasi nasional data VPO UPI MK semester 2 Tahun 2025 dan rencana pelaksanaan VPO UPI Mikro dan Kecil (MK) dan Menengah dan Besar (MB) Tahun 2026. Kegiatan membahas perkembangan validasi nasional data VPO UPI MK semester 1 tahun 2025 serta rencana pelaksanaan validasi semester 2 tahun 2025 dan pendataan tahun 2026. Data semester 1 telah tersedia namun belum sepenuhnya valid karena belum seluruh provinsi melakukan validasi. Pelaksanaan validasi selanjutnya masih menunggu penetapan enumerator dan validator di kabupaten/kota. Untuk tahun 2026, diperlukan penetapan populasi UPI MK yang terkendala akses data KUSUKA, sehingga perlu perbaikan sistem dan pemutakhiran data secara berkala. Selain itu, akan dilakukan pengembangan modul agar data VPO UPI MK dan MB terintegrasi. Target penyampaian angka final VPO tahun 2025 ditetapkan paling lambat akhir September 2026 sebelum rilis resmi pada 15 Oktober 2026.



Gambar 7. Pembahasan Rencana Pelaksanaan Pendataan VPO Unit Pengolahan Ikan (UPI) Tahun 2025 dan 2026

4. Penetapan Populasi Unit Pengolahan Ikan (UPI) Skala Mikro dan Kecil Tahun 2025

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2026 dilaksanakan secara luring di R.R. Meeting 2 Lt. 15. Kegiatan dipimpin oleh dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Pemetaan dan Analisis Pengolahan serta dihadiri oleh perwakilan Pusdatin, Direktorat Pemberdayaan Usaha, Tim Kerja Pembinaan Mutu dan Keamanan Produk, dan Tim Kerja Pembinaan Pengolahan Hasil. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah Menyepakati bersama kriteria UPI MK serta menetapkan populasi UPI MK, yang akan menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan. Populasi UPI yang dipublikasi pada tahun berjalan merupakan data per 31 Desember tahun sebelumnya. Hasil kegiatan menyepakati kriteria dan penetapan populasi UPI mikro dan kecil (MK) sebagai dasar pelaksanaan pembinaan, dengan menggunakan data KUSUKA per 31 Desember 2025. Kriteria yang digunakan meliputi identitas pelaku usaha, lokasi, skala usaha, serta jenis kegiatan pengolahan. Berdasarkan hasil pembersihan data sesuai kriteria tersebut, ditetapkan populasi UPI MK tahun 2026 sebanyak 81.429 unit yang tersebar di 37 provinsi dan 488 kabupaten/kota. Data ini akan menjadi acuan resmi publikasi dan perencanaan kegiatan ke depan.



Gambar 8. Penetapan Populasi Unit Pengolahan Ikan (UPI) Skala Mikro dan Kecil Tahun 2025

B. Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan Bagi Unit Penanganan dan Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan

Kegiatan Pembinaan Industri Pengolahan Produk dilaksanakan melalui sosialisasi, bimbingan teknis (bimtek), maupun pembinaan lapangan, dengan output berupa rekomendasi, manual Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP), serta laporan pembinaan. Kegiatan ini merupakan integrasi dari dua lingkup kerja, yaitu Pembinaan Peningkatan Mutu Unit Pengolah Hasil (Tim Kerja Pembinaan Pengolahan Hasil) dan Pembinaan Peningkatan Produktivitas Skala Menengah dan Besar (Tim Kerja Pembinaan Mutu dan Keamanan Produk). Pada Triwulan I tahun 2026, realisasi kinerja mencapai 58 Industri, capaian tersebut setara dengan 8,92% dari total target tahunan sebesar 650 industri. Berdasarkan hasil pembinaan terhadap 58 industri, sebaran pelaku usaha per provinsi menunjukkan bahwa pembinaan masih didominasi oleh wilayah Pulau Jawa, khususnya Jawa Barat (37 Industri), Banten (5 Industri), dan Jawa Tengah (5 Industri). Selanjutnya diikuti oleh DKI Jakarta (4 Industri) dan Jawa Timur (3 Industri). Sementara itu, provinsi lainnya memiliki jumlah yang lebih terbatas, yaitu Kalimantan Barat (1 Industri), Maluku (1 Industri), Nusa Tenggara Barat (1 Industri), Sulawesi Selatan (1 Industri), dan Sulawesi Tengah (1 Industri). Adapun provinsi dengan masing-masing 1 UMKM meliputi Lampung, Bengkulu, Nusa Tenggara Barat, dan DI Yogyakarta. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan telah menjangkau berbagai wilayah di Indonesia, meskipun masih perlu ditingkatkan pemerataannya di luar Pulau Jawa.

Dari sisi produk, mayoritas Industri yang dibina masih didominasi oleh produk ikan beku, ikan hidup, pempek, *pasteurized crab meat*, dan ikan pelagis beku. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung Pembinaan Mutu dan

Keamanan Pangan Bagi Unit Penanganan dan Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan, yaitu:

1. Pembinaan Penerapan Kelayakan Pengolahan dan Penerapan HACCP

Kegiatan dilaksanakan selama bulan Januari s.d. Maret 2026 dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting. Kegiatan diikuti oleh unsur Direktorat Pengolahan (Tim Pembina Mutu Pusat), Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi (Jawa Timur dan Jawa Barat), Dinas Kabupaten/Kota (Bondowoso, Bogor, Bekasi, Probolinggo), UPT terkait, dan pelaku usaha/UPI (Koperasi Ponpes Al-Ishlah, Papa Opanz, PT. Zita Kreatif Indonesia, Pempek Ameer@, Aurafood, Citra Prima Jaya, dan Abon Pancen Wenak). Kegiatan juga melibatkan pembina mutu daerah baik secara langsung maupun daring. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk: melaksanakan pembinaan penerapan kelayakan pengolahan dalam persiapan sertifikasi SKP/HACCP pada UPI dan UMKM perikanan, mempercepat proses pengajuan dan perpanjangan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP), termasuk penyelesaian kendala perizinan (NIB, KBLI, Sertifikat Standar), meningkatkan kesiapan pelaku usaha dalam penerapan sistem mutu, SNI, dan HACCP guna mendukung daya saing dan ekspor. memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dalam pelaksanaan pembinaan mutu dan keamanan produk. Kegiatan pembinaan dan koordinasi telah berjalan dengan baik dan menunjukkan progres positif dalam peningkatan pemenuhan aspek legalitas, penerapan kelayakan pengolahan, serta kesiapan menuju HACCP. Namun demikian, masih diperlukan tindak lanjut berupa:

- a. Perbaikan legalitas usaha (terutama KBLI dan Sertifikat Standar).
- b. Penguatan penerapan CPPOB dan konsistensi sanitasi.
- c. Penyempurnaan dokumen dan implementasi HACCP.
- d. Pendampingan berkelanjutan dan sinergi lintas instansi.

Dengan tindak lanjut yang konsisten, diharapkan seluruh UPI/UMKM dapat segera memperoleh atau memperpanjang SKP, meningkatkan kapasitas usaha, serta memperkuat daya saing hingga kesiapan ekspor.



Gambar 9. Pembinaan Penerapan Kelayakan Pengolahan dan Penerapan HACCP

2. Rapat Pembahasan Kurikulum dan GBPP *Corporate University*

Kegiatan dilaksanakan selama bulan Januari s.d. Maret 2026, dilaksanakan secara *hybrid* di R.R. Pembinaan Mutu Lt. 12A GMB 3. Kegiatan diikuti oleh Ketua Tim Kerja (Katimja) Pembinaan Mutu dan Keamanan Produk, perwakilan Pusat Pelatihan BPSPMKP, tim Corpu, serta tim penyusun kurikulum dan modul pelatihan lingkup Direktorat Pengolahan. Tujuan pelaksanaan kegiatan, yaitu:

- Menyusun dan membahas kurikulum serta Garis-Garis Besar Program Pembelajaran (GBPP) untuk pelatihan Audit Internal, Kelayakan Pengolahan, Penerapan Sistem HACCP dan Diversifikasi Produk Pangan/Nonpangan.
- Menyepakati struktur, substansi materi, metode pembelajaran, serta mekanisme penyusunan modul pelatihan.
- Menentukan pembagian tugas tim dalam penyusunan modul serta pelaksanaan kegiatan *Corporate University* (Corpu).
- Menyelaraskan kurikulum pelatihan dengan kebutuhan kompetensi pembina mutu dan pelaku usaha.

Seluruh rangkaian kegiatan rapat menghasilkan kesepakatan terkait penyusunan kurikulum dan GBPP pelatihan Audit Internal, Kelayakan Pengolahan, dan Sistem HACCP yang terstruktur, sistematis, dan berbasis kompetensi. Kurikulum yang disusun menekankan keseimbangan antara teori dan praktik, serta disesuaikan dengan kebutuhan pembina mutu dan pelaku usaha. Selain itu, telah ditetapkan mekanisme penyusunan modul yang mencakup tahapan uji coba, ToT, dan evaluasi untuk menjamin kualitas materi pelatihan. Dengan tersusunnya kurikulum dan GBPP ini, diharapkan pelaksanaan program *Corporate University* (Corpu) dapat berjalan efektif dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia serta

mendukung penerapan mutu dan keamanan produk perikanan secara berkelanjutan.



Gambar 10. Rapat Pembahasan Kurikulum dan GBPP Corporate University

3. Pembinaan SKP dan HACCP untuk UMKM Naik Kelas

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2026, dilaksanakan secara luring di R.R. Pembinaan Mutu Lt. 12A GMB 3. Kegiatan diikuti oleh Ketua Tim Kerja (Katimja) Pembinaan Mutu dan Keamanan Produk, Tim Pembina Mutu Pusat, Tim Pendamping lingkup Direktorat Pengolahan, perwakilan Direktorat Pemberdayaan Usaha, serta pelaku usaha UMKM pengolahan hasil perikanan (UMKM Naik Kelas dan UMKM menuju ekspor). Tujuan pelaksanaan kegiatan, yaitu:

- Melaksanakan tindak lanjut pembinaan penerapan kelayakan pengolahan (GMP dan SSOP) serta sistem HACCP pada UMKM naik kelas.
- Mengidentifikasi tingkat kesiapan UMKM dalam pemenuhan persyaratan pengajuan SKP dan sertifikasi HACCP.
- Membahas perkembangan hasil pembinaan HACCP pasca kunjungan lapangan serta merumuskan langkah tindak lanjut percepatan sertifikasi.
- Mendorong peningkatan mutu, keamanan produk, dan daya saing UMKM, khususnya dalam rangka kesiapan ekspor.

Kegiatan pembinaan dan koordinasi telah berjalan dengan baik dan menunjukkan progres positif pada sebagian UMKM dalam pemenuhan persyaratan SKP dan HACCP. Sebanyak 11 UMKM telah dinilai siap untuk melanjutkan ke tahap penerapan HACCP, sementara UMKM lainnya masih dalam tahap pemenuhan aspek dasar dan legalitas. Meskipun masih terdapat kendala, terutama pada aspek KBLI dan keterbatasan pembina mutu di daerah, melalui pendampingan berkelanjutan dan koordinasi lintas instansi diharapkan seluruh UMKM dapat segera memperoleh

sertifikasi. Hal ini akan mendukung peningkatan mutu dan keamanan produk serta memperkuat daya saing UMKM di pasar nasional maupun ekspor.



Gambar 11. Pembinaan SKP dan HACCP untuk UMKM Naik Kelas

4. Bimbingan Teknis Pembinaan Mutu dan Usaha Pengolahan

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2026, dilaksanakan secara *hybrid* di Hotel Lido Lake Part Resort, Bogor. Kegiatan dibuka Plt. Dirjen PDSPKP dan dipimpin oleh Direktur Pengolahan. Dihadiri oleh Pembina Mutu Pusat sebanyak 55 orang dan 9 perwakilan Pembina Mutu Daerah dari Kab Bogor, Kab Depok, Kab. Sukabumi dan Kota. Bogor, dan peserta offline sebanyak 500 orang. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi pembina mutu di bidang pengolahan hasil kelautan dan perikanan, memperkuat peran pembina mutu dalam penerapan standar mutu, keamanan pangan, dan persyaratan pasar dan mendukung penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan agar mampu memenuhi tuntutan pasar domestik dan internasional. Kegiatan ini menunjukkan adanya komitmen kuat pemerintah, khususnya Ditjen PDSPKP, dalam mendukung program prioritas nasional melalui penguatan sektor kelautan dan perikanan berbasis Ekonomi Biru. Upaya tersebut diwujudkan melalui pengembangan pangan biru, peningkatan kesejahteraan nelayan, serta percepatan hilirisasi dan peningkatan nilai tambah produk perikanan. Kebijakan pembinaan mutu tahun 2026 difokuskan pada peningkatan daya saing produk melalui penerapan CPIB/SKP dan PMMT/HACCP yang didukung oleh peran Pembina Mutu secara berjenjang. Hal ini diperkuat dengan penerapan SNI sebagai instrumen jaminan mutu dan keamanan pangan, serta dukungan pembinaan bagi UMK melalui skema SNI Bina UMK. Selain itu, pemahaman literasi keuangan menjadi aspek penting dalam mendukung keberlanjutan usaha, melalui pengelolaan keuangan dan investasi yang

tepat. Antusiasme peserta dalam diskusi menunjukkan tingginya kebutuhan pemahaman terhadap regulasi, standar mutu, dan mekanisme sertifikasi. Secara keseluruhan, kegiatan ini menghasilkan peningkatan pemahaman peserta serta penguatan sinergi antara pusat, daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam percepatan penerapan standar mutu, sertifikasi, dan peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan di pasar domestik maupun ekspor.



Gambar 12. Bimbingan Teknis Pembinaan Mutu dan Usaha Pengolahan

5. Pembahasan modul penanganan pasca panen dalam rangka operasional Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP)

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2026, dilaksanakan secara luring di R.R. Pembinaan Mutu Lt. 12A GMB 3. Kegiatan dibuka oleh Katimja Pembinaan Mutu dan Keamanan Produk dan dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat Prasarana dan Sarana serta Tim Kerja lingkup Direktorat Pengolahan. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah membahas modul penanganan pasca panen yang akan digunakan sebagai instrument dalam operasionalisasi KNMP. Diperlukan langkah strategis untuk mendukung implementasi program melalui penguatan kelembagaan dan operasional. Hal ini mencakup pentingnya pendampingan operasional kepada KNMP agar kegiatan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Selain itu, perlu diusulkan pembentukan ketua tim kerja Diversifikasi Pangan dalam SK Satgas untuk mendukung pengembangan modul usaha kuliner, serta katimja Diversifikasi Non Pangan untuk modul penanganan pasca panen. Modul-modul yang telah disusun juga perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan SOP sebagai pedoman pelaksanaan yang nantinya akan disosialisasikan kepada KNMP. Selanjutnya, perlu direncanakan mekanisme pelaksanaan modul, khususnya yang berkaitan dengan sertifikasi mutu, termasuk mempertimbangkan keterlibatan penyuluh dalam proses tersebut guna memastikan efektivitas dan keberhasilan implementasi di lapangan.



Gambar 13. Pembahasan modul penanganan pasca panen dalam rangka operasional Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP)

6. Rapat Pembahasan Instrumen Audit Internal HACCP bagi UMKM

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2026, dilaksanakan secara *hybrid* di R.R. Pembinaan Mutu Lt. 12A GMB 3. Kegiatan dipimpin oleh Ketua Tim Kerja (Katimja) Pembinaan Mutu dan Keamanan Produk dan dihadiri oleh perwakilan BBPMHKP, Tim Kerja Pembinaan dan Pengolahan Hasil, Tim Kerja Standardisasi, serta Tim Kerja Pembinaan Mutu dan Keamanan Produk. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah, untuk:

- Membahas dan menyusun instrumen audit internal penerapan sistem HACCP bagi UMKM pengolahan hasil perikanan.
- Membahas dan menyempurnakan template manual HACCP produk abon ikan sebagai panduan penerapan sistem HACCP pada UPI skala UMKM

Kegiatan pembahasan instrumen audit internal HACCP bagi UMKM dan template manual HACCP abon ikan menghasilkan kesepakatan terkait penyusunan formulir audit internal HACCP yang terdiri dari daftar hadir dan daftar periksa audit, serta penyusunan template manual HACCP produk abon ikan sebagai panduan penerapan HACCP pada UPI skala UMKM. Selanjutnya, kedua dokumen tersebut akan difinalisasi sesuai dengan hasil pembahasan rapat dan ketentuan yang berlaku.



Gambar 14. Rapat Pembahasan Instrumen Audit Internal HACCP bagi UMKM

7. Rapat Koordinasi Pembinaan dan Sertifikasi SKP

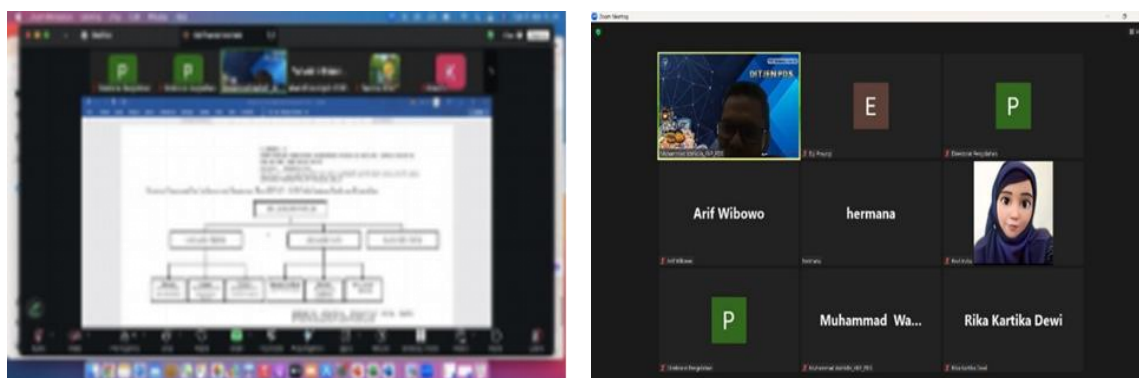
Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2026, dilaksanakan secara *hybrid* di R.R. Pembinaan Mutu Lt. 12A GMB 3. Kegiatan dipimpin oleh Katimja Pembinaan Mutu dan Keamanan Produk dan dihadiri oleh perwakilan dari BPPMHKP, Pusdatin, dan Tim Kerja Pembinaan Mutu dan Keamanan Produk. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah melakukan pembahasan terkait pembinaan dan Sertifikasi SKP di lokasi KNMP, Pembinaan dan sertifikasi di kawasan perdagangan bebas, Harmonisasi klasifikasi produk dalam KBLI, dan Hal-hal lain yang berkembang. Rapat koordinasi pembinaan dan sertifikasi SKP menghasilkan pemahaman bersama bahwa percepatan sertifikasi SKP, khususnya pada lokasi KNMP dan kawasan perdagangan bebas, masih menghadapi berbagai kendala teknis dan administratif, seperti kesiapan operasional sarana, ketidaksinkronan sistem OSS dengan aplikasi SKP, serta perbedaan klasifikasi KBLI antara CPPOB dan SKP. Optimalisasi pemanfaatan fasilitas Gudang Beku Portable (GBP) di lokasi KNMP perlu didukung dengan kesiapan operasional, pemenuhan persyaratan administratif, serta kejelasan peran usaha (pengolahan atau distribusi). Selain itu, harmonisasi sistem perizinan dan klasifikasi usaha menjadi aspek penting untuk memastikan kelancaran proses sertifikasi. Melalui penguatan koordinasi lintas instansi, penyesuaian regulasi, serta peningkatan kapasitas melalui bimbingan teknis, diharapkan proses pembinaan dan sertifikasi SKP dapat berjalan lebih efektif dan terintegrasi, sehingga mampu mendukung peningkatan mutu, keamanan produk, dan daya saing sektor pengolahan hasil perikanan.



Gambar 15. Rapat Koordinasi Pembinaan dan Sertifikasi SKP

8. Rapat Pembahasan SK Tim ISO 9001:2015 lingkup Direktorat Pengolahan

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2026, dilaksanakan secara *hybrid* melalui *zoom meeting*. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Pembinaan Mutu dan Keamanan Produk dan dihadiri oleh perwakilan tim kerja lingkup Direktorat Pengolahan. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk membahas draft SK Tim ISO Direktorat Pengolahan sebagai dasar penetapan struktur organisasi, tugas, dan fungsi tim dalam mendukung implementasi sistem manajemen mutu. Kegiatan Pembahasan Draft SK Tim ISO Direktorat Pengolahan telah menghasilkan sejumlah masukan strategis terkait perbaikan redaksi, penguatan struktur organisasi, kejelasan tugas dan fungsi, serta penyempurnaan sistem mutu. Hasil rapat ini menjadi dasar dalam penyusunan draft final SK Tim ISO yang lebih komprehensif, adaptif, dan mampu mendukung peningkatan kualitas pembinaan serta kemudahan bagi pelaku usaha dalam memenuhi standar dan regulasi yang berlaku.

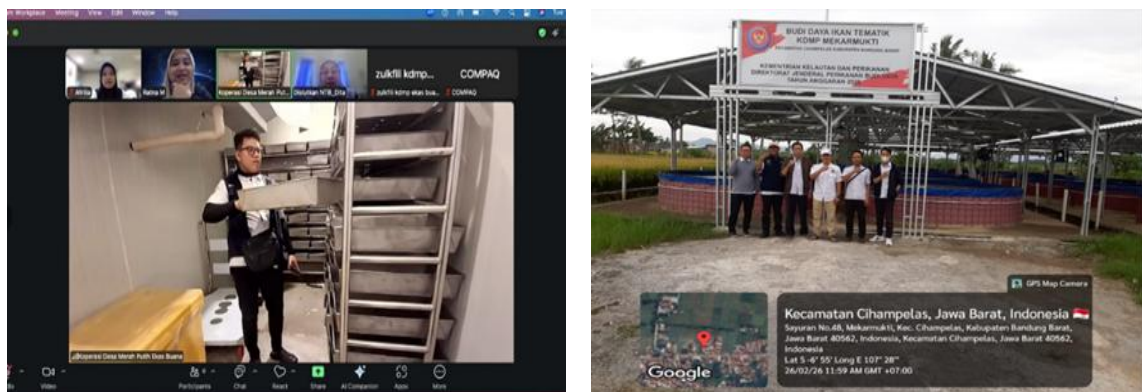


Gambar 16. Rapat Pembahasan SK Tim ISO 9001:2015 lingkup Direktorat Pengolahan

9. Pembinaan Kelayakan Pengolahan untuk KNMP

Kegiatan dilaksanakan selama bulan Januari s.d. Maret 2026, dilaksanakan di beberapa daerah (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan NTB). Kegiatan dihadiri oleh perwakilan DKP Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), DKP Kabupaten Lombok Barat, ketua KNMP Ekas Buana, pengelola KDMP Bioflok Cihampelas, pengelola KNMP Untia, pelaku UMKM pengolahan rumput laut (JASUDA), pengelola KNMP Pakistaji, dan penyuluh perikanan. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk membina penerapan kelayakan pengolahan produk perikanan, mengidentifikasi kesiapan sarana prasarana, memperkuat kelembagaan koperasi, mengembangkan hilirisasi produk, dan mendukung program prioritas KKP. Kegiatan pembinaan di berbagai lokasi menunjukkan bahwa potensi pengembangan sektor kelautan dan perikanan cukup besar, baik pada aspek budidaya, pengolahan,

maupun hilirisasi produk. Namun demikian, masih terdapat berbagai kendala yang perlu ditindaklanjuti, antara lain aspek legalitas usaha (KBLI dan perizinan), kesiapan sarana prasarana, efisiensi produksi, serta keterbatasan fasilitas pengolahan. Melalui pendampingan yang berkelanjutan, penguatan kelembagaan, serta peningkatan sinergi antara pusat, daerah, dan pelaku usaha, diharapkan seluruh program dapat berjalan optimal. Hal ini akan mendukung peningkatan mutu dan nilai tambah produk, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan.

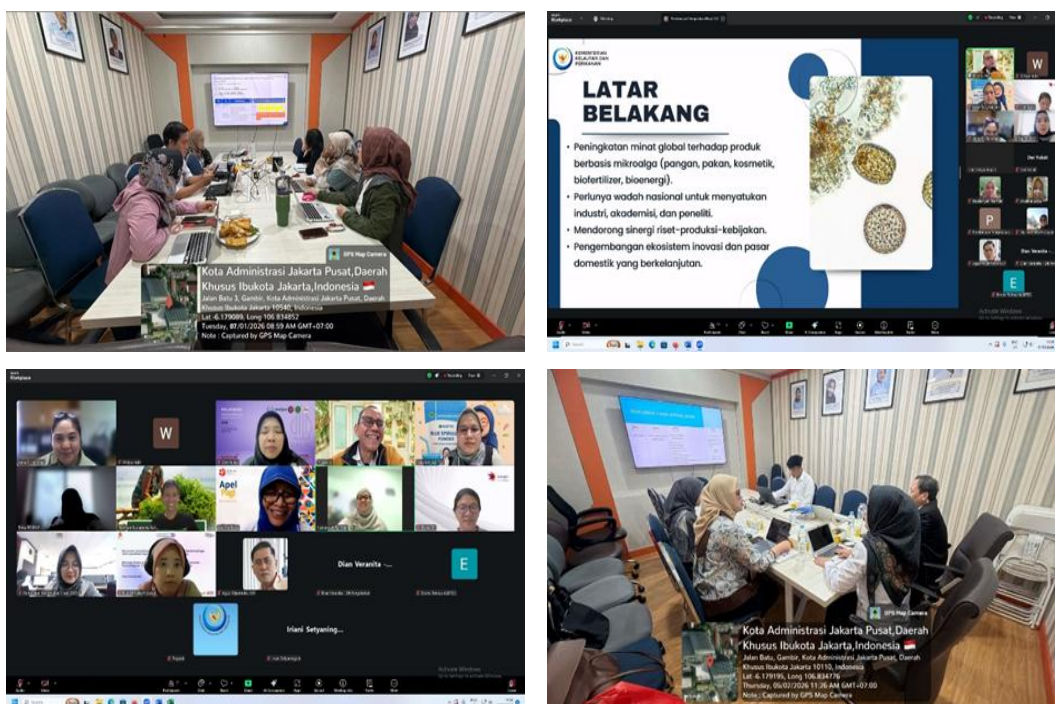


Gambar 17. Pembinaan Kelayakan Pengolahan untuk KNMP

10. Rapat Pembahasan Struktur Pengurus ASMI

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2026, dilaksanakan secara *hybrid* di R.R. Pembinaan Mutu Lt. 12A GMB 3. Kegiatan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Direktorat Pengolahan, perwakilan kementerian, akademisi dari IPB University, pelaku usaha, notaris, dan tim kerja terkait. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memperkuat unit penanganan dan pengolahan hasil perikanan, termasuk mengidentifikasi stakeholder, menyusun struktur organisasi ASMI, mempersiapkan legalitas pendirian ASMI, membangun sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan akademisi, serta merumuskan langkah pembinaan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan. Dalam Rapat Pembahasan Struktur Pengurus ASMI, disepakati struktur pengurus dan draft AD/ART, namun ada kekurangan masukan dari pengurus. Rapat Persiapan Pengurusan Akta Pendirian ASMI membahas tahapan pendirian badan hukum, namun ada potensi duplikasi nama asosiasi. Kegiatan Pembinaan di KNMP dan KDMP mencakup evaluasi pemanfaatan fasilitas pengolahan dan kebutuhan pembinaan lanjutan. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah bahwa persiapan berjalan baik dengan struktur ASMI yang

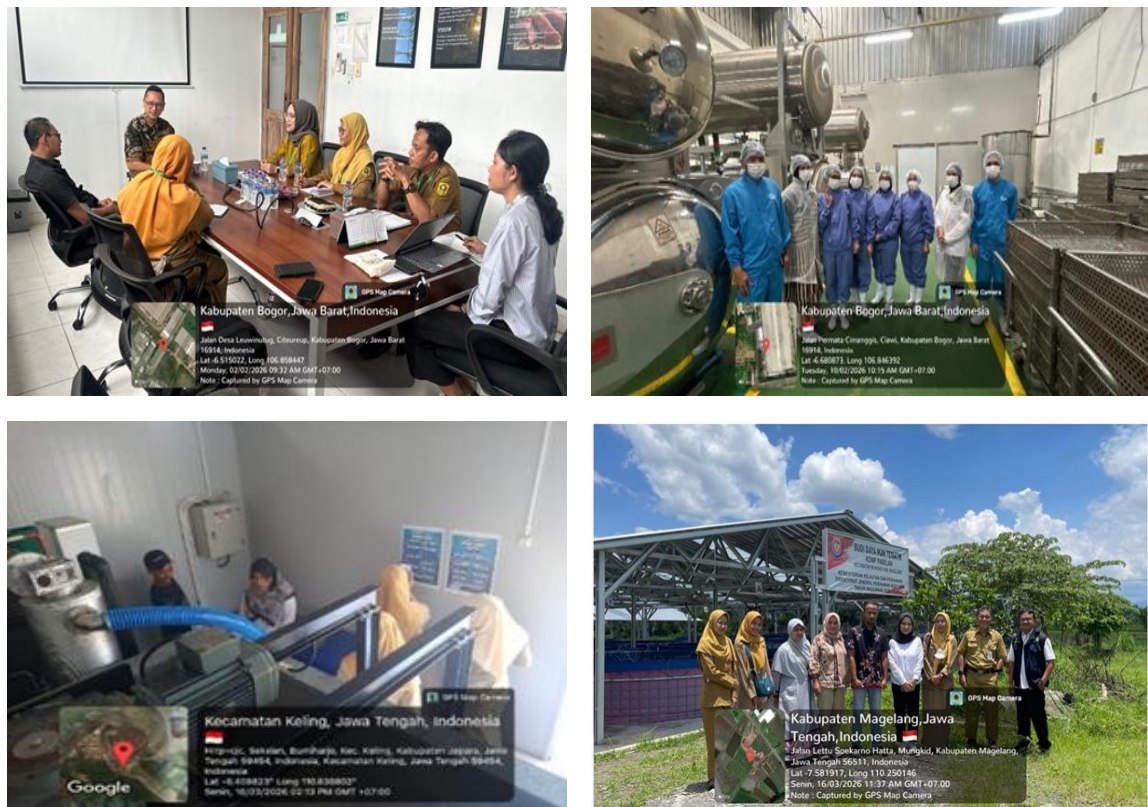
terbentuk dan legalitas dalam proses, meskipun ada beberapa permasalahan, termasuk penyempurnaan dokumen dan koordinasi yang perlu ditingkatkan untuk menjalankan program secara efektif.



Gambar 18. Rapat Pembahasan Struktur Pengurus ASMI

11. Pembinaan Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan Skala Menengah dan Besar yang Dibina

Kegiatan dilaksanakan selama bulan Februari s.d. Maret 2026, dilaksanakan di beberapa lokasi (PT. Indogal Agro, Kabupaten Bogor; PT. Jakarana Tama, Kabupaten Bogor; KDMP Pabelan, Kabupaten Magelang ; dan KNMP Bumiharjo, Kabupaten Jepara). Kegiatan diikuti oleh perwakilan dari Direktorat Pengolahan, pengelola UPI, pemerintah daerah, dan pelaku usaha. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk mengidentifikasi potensi, kendala, dan peluang pengembangan usaha demi meningkatkan nilai tambah dan keberlanjutan industri pengolahan hasil perikanan. UPI skala menengah dan besar memiliki potensi besar dalam pengembangan industri pengolahan hasil perikanan, tetapi menghadapi berbagai masalah terkait mutu, perizinan, sarana prasarana, dan manajemen usaha. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan lanjutan untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha.

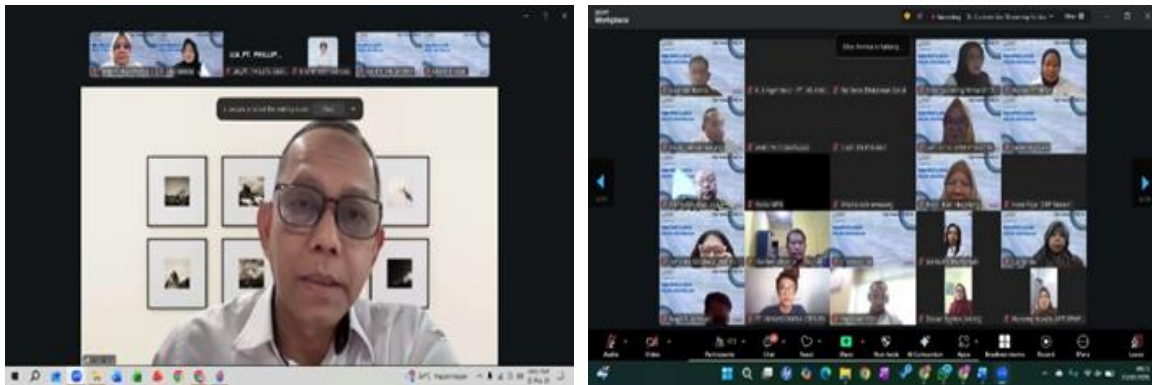


Gambar 19. Pembinaan Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan Skala Menengah dan Besar yang Dibina

12. Webinar dengan tema “Manajemen Alergen pada Unit Pengolahan Ikan (UPI)”

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2026, dilaksanakan secara daring melalui *Zoom Meeting* dan *streaming youtube*. Kegiatan diikuti oleh 1.255 peserta yang terdiri dari perwakilan KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan, Pembina Mutu, APHP, penyuluh, pelaku usaha, akademisi, asosiasi, dan masyarakat umum. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk meningkatkan pemahaman manajemen alergen, mensosialisasikan regulasi, mengintegrasikan manajemen alergen dalam HACCP. Materi meliputi konsep dasar alergen, regulasi pengendalian alergen di pasar ekspor, dan integrasi dalam sistem HACCP. Syamsul Arifin dari Global Reliance International (GRI) menjelaskan bahwa terdapat sembilan jenis alergen utama yang harus dicantumkan pada label produk. Pengendalian alergen di Unit Pengolahan Ikan (UPI) harus terintegrasi dengan sistem HACCP, termasuk analisis bahaya dan pengendalian proses. Diskusi juga membahas penerapan manajemen alergen di UPI skala kecil dan menengah, serta perlunya pendampingan teknis untuk pemahaman yang lebih baik. Webinar ini memberikan pemahaman komprehensif mengenai pentingnya pengendalian alergen sebagai bagian integral dari sistem jaminan mutu dan keamanan pangan di UPI.

Pengelolaan alergen yang baik tidak hanya melindungi kesehatan konsumen, tetapi juga meningkatkan daya saing dan keberterimaan produk perikanan Indonesia di pasar ekspor. Integrasi manajemen alergen dalam sistem HACCP serta kepatuhan terhadap persyaratan pelabelan menjadi aspek krusial dalam menjaga reputasi dan keberlanjutan usaha.



Gambar 20. Webinar dengan tema “Manajemen Alergen pada Unit Pengolahan Ikan (UPI)”

Meningkatnya Produksi Olahan Kelautan dan Perikanan

IK 2. Volume Produksi Olahan Perikanan

Produksi Olahan KP adalah volume produk olahan (VPO) hasil perikanan yang dihasilkan oleh unit pengolahan ikan skala mikro, kecil (MK) dan skala menengah besar (MB). Capaian VPO pada periode penghitungan merupakan angka prognosa.

Penghitungan VPO skala Menengah Besar menggunakan data volume dan jenis produk UPI Skala Menengah Besar (UPI MB) yang tercatat dalam data BPPMHKP dan Badan Karantina Indonesia. Data yang dikumpulkan meliputi data ekspor dan domestik keluar. Data lalu lintas ikan digunakan sebagai pendekatan dalam penghitungan VPO UPI MB, karena menyediakan data volume dan jenis produk olahan yang diproduksi oleh UPI MB. Penghitungan VPO skala mikro menggunakan data yang diperoleh dari pendataan Produksi Olahan UPI MK kemudian diolah. Pendataan dilakukan terhadap 13 (tiga belas) jenis kegiatan UPI meliputi: 1) pendinginan/pengesan ikan, 2) pembekuan ikan, 3) penggaraman/pengeringan ikan, 4) pemindangan ikan, 5) pengasapan/pemanggangan ikan, 6) peragian/fermentasi ikan, 7) pengalengan ikan, 8) pengolahan berbasis lumatan daging ikan/jelly ikan atau surimi, 9) pengolahan kerupuk ikan, kripik, peyek ikan, 10) pembuatan minyak ikan, 11) pengolahan rumput laut, 12) penanganan

ikan, dan 13) pengolahan ikan lainnya Data yang disajikan adalah data volume produk olahan.

Tabel 4. Ikhtisar Pencapaian Volume Produksi Olahan Perikanan

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I 2026	% Realisasi s.d. TW I Terhadap Target 2026	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2026	TW IV 2025	TW I 2024	Tahun 2026	TW I 2026	TW IV 2025	TW I 2025	s.d. TW I 2026			TW IV 2025	TW I 2026
Volume Produksi Olahan Perikanan	-	3,71	-	3,83	-	3,78	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan data capaian Indikator Kinerja (ik) *Volume Produksi Olahan Perikanan*, belum terdapatnya realisasi capaian pada triwulan I tahun 2026. Hal ini dikarenakan mekanisme pelaporan indikator tersebut bersifat semesteran, sehingga capaiannya baru akan tersedia pada Triwulan II. Indikator ini merupakan indikator kinerja baru pada triwulan IV tahun 2025 yang merupakan tahun pertama periode Renstra 2025-2029. Oleh karena itu capaiannya belum dapat dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya. Adanya kenaikan jumlah target pada tahun 2026 jika dibandingkan dengan target tahun 2025, pada tahun 2025 IK Volume Produksi Olahan Perikanan memiliki target sebesar 3,71 Juta Ton sedangkan pada tahun 2026 terdapat kenaikan 0,12 poin atau naik menjadi 3,83 Juta Ton.

Alokasi anggaran IK Volume Produksi Olahan Perikanan merupakan gabungan dari empat kegiatan (RO) mengacu pada dokumen rencana evaluasi rencana aksi yang telah ditetapkan ada tiga (3) kegiatan, yaitu: Perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia, Identifikasi Produk Pangan dan Non Pangan Produk Bernilai Tambah Hasil Kelautan dan Perikanan, dan Pembinaan Unit Penanganan dan Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan Skala Mikro dan Kecil. Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Volume Produksi Olahan Perikanan sebesar Rp 4.823.009.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan I Tahun 2026 sebesar Rp 769.421.945,- atau sebesar 15,95% dari pagu anggaran. Dikarenakan belum terdapatnya realisasi IKU pada triwulan I dan baru akan dapat direalisasikan pada triwulan II, sehingga pada triwulan ini tidak dapat dilakukan penghitungan terhadap nilai efisiensi anggaran IK.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung indikator kinerja di atas antara lain :

A. Perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia

Tahapan Perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) meliputi RSNI1, RSNI2, RSNI3, Penyampaian RSNI ke BSN. Perumusan rancangan SNI dilakukan oleh Komite teknis yang dikelola oleh Direktorat Pengolahan, Ditjen PDSPKP. Kegiatan tersebut pada tahun 2026 memiliki target sebanyak 4 dokumen yang baru akan dapat dicapai pada triwulan IV. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka Perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia, yaitu:

1. Rapat Koordinasi dengan Anggota Komite Teknis 65-05: Produk Perikanan dan Komite Teknis 65-08

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal dilaksanakan 20 Januari 2026, dilaksanakan secara *hybrid* di R.R. Pembinaan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Lt. 12A GMB 3 KKP. Kegiatan dibuka oleh Ketua Tim Kerja Pengembangan dan Penerapan Standar Produk selaku Sekretaris Komite Teknis mewakili Ketua Komite Teknis, dan dihadiri oleh Perwakilan dari Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Penilaian Kesesuaian Badan Standardisasi Nasional, anggota Komite Teknis 65-05: Produk Perikanan, anggota Komite Teknis 65-08: Produk Perikanan Nonpangan serta pelaksana Tim Kerja Pengembangan dan Penerapan Standar Direktorat Pengolahan. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah mempersiapkan penyusunan RSNI yang masuk di dalam Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) Tahun 2026 dimaksud, pada rapat koordinasi ini akan dilakukan diskusi dan pembahasan mengenai mekanisme perumusan Standar Nasional Indonesia serta peran, tugas, dan tanggung jawab dari Komite Teknis. Materi yang disampaikan terkait “Peraturan BSN Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengembangan Standar Nasional Indonesia, yang terdiri dari:

- Pengelolaan Komite Teknis (ruang lingkup, pembentukan, persyaratan anggota komtek, tugas dan tanggung jawab anggota , evaluasi komtek);
- Penyusunan PNPS;
- Perumusan SNI (tahapan pengembangan SNI mulai dari perencanaan sampai dengan pemeliharaan);
- Ketentuan adopsi standar internasional ke Standar Nasional Indonesia;
- Kaji Ulang SNI;
- Daftar kewajiban kaji ulang SNI Komtek 65-05 sebanyak 35 SNI



Gambar 21. Rapat Koordinasi dengan Anggota Komite Teknis 65-05: dan Komite Teknis 65-08

2. Rapat Penguatan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Perikanan

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2026, dilaksanakan secara luring di R.R. Pembinaan Mutu Lt. 12A GMB 3. Kegiatan dipimpin oleh Katimja pengembangan dan Penerapan Standar Produk dan dihadiri oleh perwakilan dari BSN dan timja lingkup Direktorat Pengolahan. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk menindaklanjuti rencana kerja sama antara Ditjen PDSPKP dengan BSN dalam rangka penguatan penerapan SNI produk perikanan terutama bagi UPI skala MK sebagai realisasi dari MoU antara KKP dan BSN. MoU KKP dengan BSN tentang Penguatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian sudah di tanda tangan Plt. Kepala BSN pada November 2025 dan saat ini masih dalam proses penandatanganan Menteri KP. Pada tahun 2026, BSN akan memfasilitasi sertifikasi SNI bagi UMKM melalui skema pembiayaan CSR dan Bank Indonesia (BI), untuk itu diperlukan kolaborasi dengan KKP. Kolaborasi KKP dan BSN dalam pendampingan pengurusan SPPT SNI kepada UMKM mulai dari pemenuhan dokumen hingga terbit SPPT SNI 6. Direktorat Pengolahan akan melakukan pembinaan kepada UMKM calon penerima fasilitas SNI dan menilai kesiapan dan komitmen UKM untuk ber SNI.



Gambar 22. Rapat Penguatan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Perikanan

3. Rapat Refreshment Penyusunan RSNI 2026

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 9 Februari 2026, dilaksanakan secara *hybrid* di R.R. Pembinaan Mutu Lt. 12A GMB 3. Kegiatan dibuka oleh Direktur Pengolahan selaku Ketua Komite Teknis dan dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Penilaian Kesesuaian-BSN, Anggota Komite Teknis 65-05: Produk Perikanan, Anggota Komite Teknis 65-08: Produk Perikanan Nonpangan, dan Tim Kerja Pengembangan dan Penerapan Standar Produk. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah, untuk memberikan pemahaman dan peningkatan bagi konseptor/editor dalam mempersiapkan draft RSNI, mempersiapkan penyusunan RSNI yang masuk di dalam Pogram Nasional Perumusan Standar (PNPS) Tahun 2025 sesuai dengan timeline yang telah direncanakan, memberikan pembekalan dan pemahaman bagi Konseptor dan Editor dalam perumusan RSNI agar tersusun dan terencana dengan baik, menyeragamkan format RSNI sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh BSN Nomor 4 tahun 2023 tentang Pedoman penulisan SNI sehingga akan mempermudah dalam koreksi, editing, dan pembahasan dengan Komite Teknis. Materi yang disampaikan oleh BSN, yaitu:

- a. Kaidah Pengembangan dan Penerapan Standar Nasional Indonesia. Muatan materi yang disampaikan meliputi pengembangan SNI, kaji ulang SNI, dan penerapan SNI
- b. Pedoman Penulisan Standar Nasional Nasional nomor 4 Tahun 2023
- c. Simulasi SNI
- d. Melakukan praktek penulisan RSNI sesuai Pedoman Penulisan SNI Nomor 4 tahun 2023

Diharapkan agar konseptor dapat menyesuaikan draft RSNI dengan Pedoman Penulisan SNI Nomor 4 tahun 2023.



Gambar 23. Rapat Refreshment Penyusunan RSNI 2026

4. Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Permohonan Peninjauan Ulang SNI 8222:2022 Produk Mackerel Kaleng Dengan Bahan Baku Jack Mackerel (*Trachurus murphyi*)

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2026, dilaksanakan secara luring di R.R. Sekretariat Lt.14, Gedung Mina Bahari III, KKP. Kegiatan dipimpin oleh Direktur Pengolahan dan dihadiri oleh perwakilan dari Badan Standardisasi Nasional (BSN), BBP3KP, dan Katimja lingkup Direktorat Pengolahan. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut atas Surat dari Kepala BBP3KP nomor B.133/BBP3KP/PDS.520/II/2026 tanggal 4 Februari 2025 perihal Peninjauan SNI 8222:2022. Usulan review SNI 8222:2022 ini terkait dengan LSPro-HP BBP3KP menerima permohonan sertifikasi SNI produk mackerel dalam kemasan kaleng yang menggunakan bahan baku Jack Mackerel (*Trachurus murphyi*). Sedangkan spesies tersebut tidak ada dalam SNI 8222:2022, sehingga BBP3KP memandang perlu untuk mereview SNI dimaksud untuk menambahkan spesies *Trachurus murphyi*. Sebagaimana kita ketahui SNI 8222:2022 tersebut merupakan SNI yang diberlakukan secara wajib sebagaimana diatur pada Permen KP nomor 32 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng dan SNI Sarden dan Mackerel dalam Kemasan Kaleng Secara Wajib.



Gambar 24. Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Permohonan Peninjauan Ulang SNI 8222:2022 Produk Makerel Kaleng Dengan Bahan Baku Jack Mackerel (*Trachurus murphyi*)

5. Rapat Penyusunan Konsep (RSNI1) Ekstrak Cair Spirulina

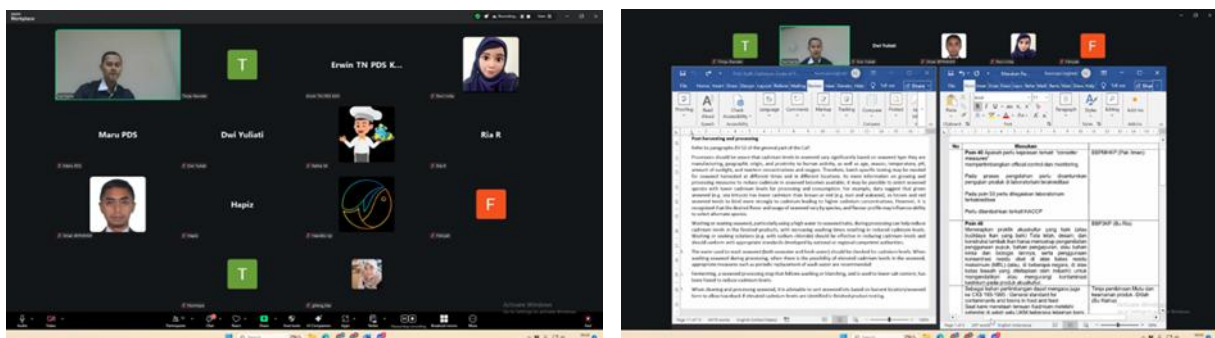
Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2026, dilaksanakan secara *hybrid* di Ruang Rapat Lt. 12A GMB 3. Kegiatan dibuka oleh Direktur Pengolahan dan dipimpin oleh Katimja Pengembangan dan Penerapan Standar Produk dan dihadiri oleh perwakilan dari BSN, anggota Komite Teknis 65-08, Konseptor, Editor Produk Perikanan Non Pangan, dan perwakilan Tim Kerja Lingkup Direktorat Pengolahan. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk membahas substansi dan editorial RSNI Ekstrak Cair Spirulina. Pada rapat RSNI1 65-08 ini dilakukan pembahasan konsep yang telah disusun oleh konseptor berupa RSNI0 berdasarkan data dukung dan literatur. Dalam rapat pembahasan konsep RSNI0 berupa presentasi konsep oleh masing-masing konseptor dan diskusi oleh seluruh peserta rapat. Berdasarkan hasil pembahasan RSNI0 yang telah dilaksanakan, Komite Teknis menyepakati bahwa RSNI0 Ekstrak Cair Spirulina menjadi RSNI1. Selanjutnya konseptor melakukan perbaikan konsep sesuai masukan yang telah diberikan oleh peserta rapat untuk dijadikan bahan pada pembahasan rapat teknis RSNI1 65-08.



Gambar 25. Rapat Penyusunan Konsep (RSNI1) Ekstrak Cair Spirulina

6. Rapat Persiapan RSNI Filet Patin

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2026, dilaksanakan secara daring melalui zoom meeting. Kegiatan dibuka oleh Direktur Pengolahan dan dihadiri oleh perwakilan dari BBP3KP, asosiasi APCI, Tim konseptor dan perwakilan Tim Kerja Lingkup Direktorat Pengolahan. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk menghasilkan konsep RSNI0 filet patin yang dapat implemtasikan dan diterima oleh produsen dan konsumen. Pengujian yang selama ini dilakukan pada filet patin yaitu pengujian kadar air pada produk. Pada SNI 8606:2020 saat ini tidak mencantumkan persentase glazing, hanya mewajibkan pencantuman berat bersih (*net weight*). Yang menjadi permasalahan selama ini adalah banyak pelaku usaha yang tidak mencantumkan berat bersih (*net weight*) dengan benar. Jika SNI filet patin ditetapkan sebagai SNI wajib maka yang perlu diatur adalah berat bersih produk bukan terkait persentase glazing produk. Untuk penentuan berat bersih dapat mengaju pada SNI 2372.2:2021. Oleh karena itu revisi SNI dan pemberlakuan SNI secara wajib. Serta perlu disepakatinya penggunaan istilah berat berat (*net weight*) pada SNI untuk menghindari multitafsir di kalangan pelaku usaha.



Gambar 26. Rapat Persiapan RSNI Filet Patin

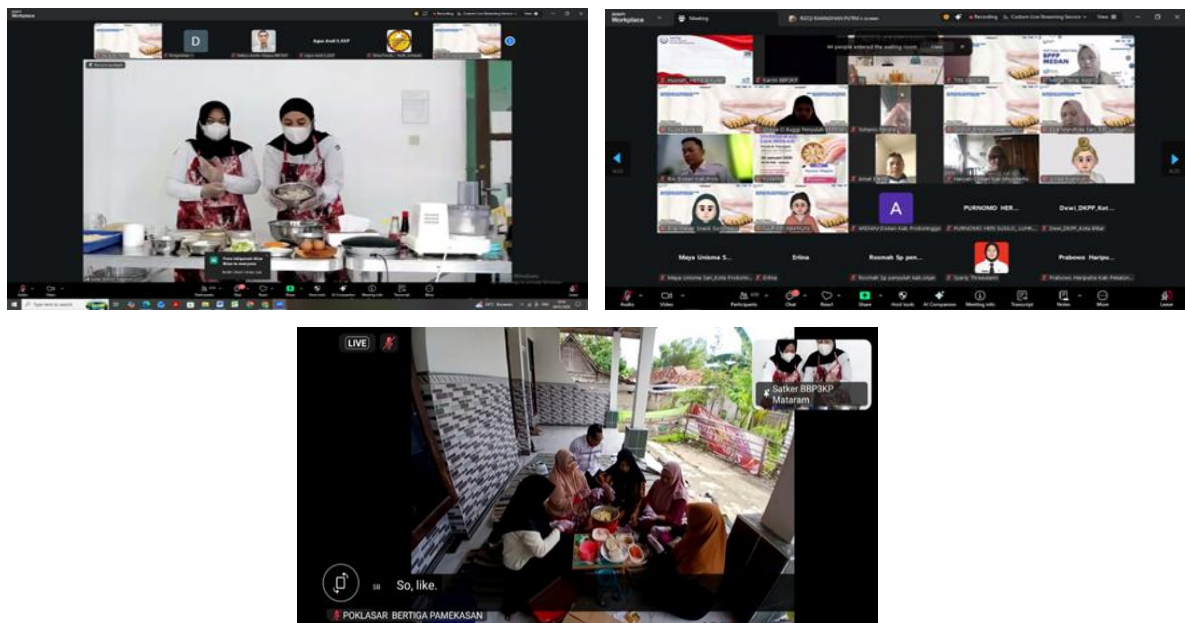
B. Identifikasi Produk Pangan dan Non Pangan Produk Bernilai Tambah Hasil Kelautan dan Perikanan

Kegiatan Identifikasi Produk Pangan dan Non Pangan Produk Bernilai Tambah Hasil Kelautan dan Perikanan merupakan bentuk usaha pembinaan terkait kelayakan dasar pengolahan bagi UPI skala mikro dan kecil (MK) dan UPI skala menengah dan besar (MB) yang bertujuan untuk meningkatkan ragam dan diversifikasi produk pangan dan non pangan dengan nilai tambah tinggi yang dihasilkan oleh UPI skala mikro dan kecil (MK) dan UPI skala menengah dan besar (MB). Kegiatan tersebut merupakan gabungan dari 2 (dua) Tim Kerja, yaitu: Tim Kerja Diversifikasi dan Inovasi Produk

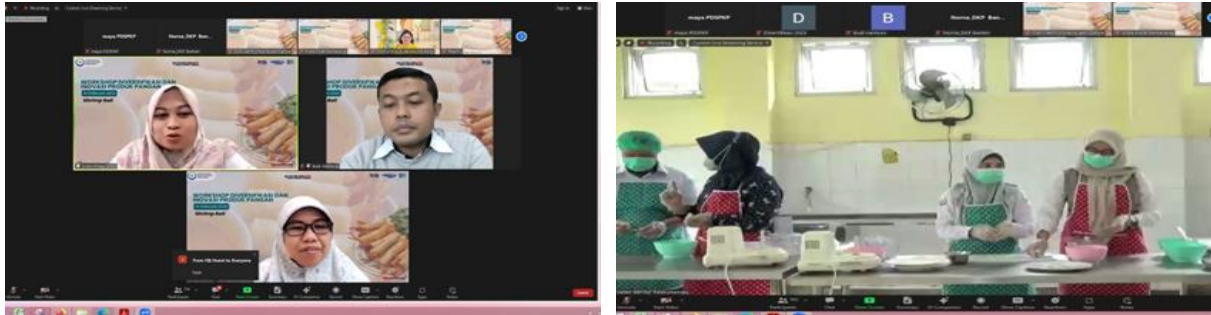
Pangan dan Tim Kerja Kerja Diversifikasi dan Inovasi Produk Non Pangan. Pada triwulan I kegiatan ini memiliki capaian sebanyak 165 UMKM, yang terdiri dari 130 UMKM Diversifikasi Pangan dan 35 UMKM Diversifikasi Non Pangan. Capaian tersebut setara dengan 5,46% dari total target tahunan sebesar 3.020 UMKM. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung Identifikasi Produk Pangan dan Non Pangan Produk Bernilai Tambah Hasil Kelautan dan Perikanan, yaitu:

1. Workshop Diversifikasi dan Nilai Tambah Produk Pangan

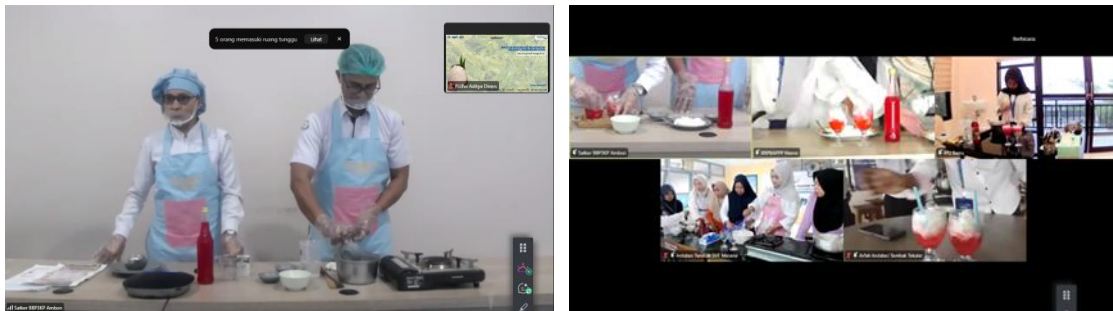
Kegiatan pembinaan pelaku usaha diversifikasi produk bernilai tambah hasil kelautan dan perikanan dilaksanakan pada tanggal 28 Januari, 9 Februari, 19 Februari, dan 12 Maret 2026, baik secara daring melalui *Zoom Meeting* dan *live streaming YouTube* maupun secara *hybrid*. Secara keseluruhan, kegiatan ini diikuti oleh total 2.420 peserta workshop melalui *Zoom Meeting* dan 372 peserta melalui *live streaming YouTube*. Peserta berasal dari UMKM, masyarakat umum, akademisi, serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota di 38 provinsi di Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan tingginya antusiasme dan partisipasi berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung pengembangan diversifikasi produk bernilai tambah hasil kelautan dan perikanan.



Gambar 27. Workshop Diversifikasi dan Nilai Tambah edisi Gyoza Tilapia bersama Satker Mataram



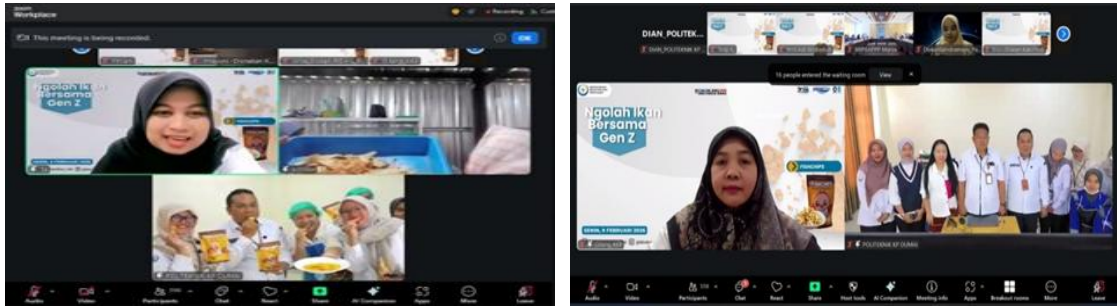
Gambar 28. Workshop Diversifikasi dan Nilai Tambah Edisi Shimp Roll bersama Satker Palabuhan Ratu



Gambar 29. Workshop Diversifikasi dan Nilai Tambah Edisi Es Kopyor Rumut Laut bersama Satker Ambon

2. Kegiatan Ngolah Ikan Bersama Gen Z Politeknik KP Dumai

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 9 Februari 2026, dilaksanakan secara *hybrid* di R.R. Meeting 2 Gedung Mina Bahari III dan secara *online* melalui *Zoom Meeting* dan *streaming youtube*. Kegiatan diikuti sebanyak 666 peserta wokshop melalui Zoom Meeting dan 88 peserta melalui *livestreaming youtube* yang berasal dari akademisi, Dinas KP Provinsi/ Kabupaten/Kota di 38 Provinsi. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah memberikan pemahaman teknis dan strategi peningkatan pemasaran produk kepada peserta utamanya Generasi Z mengenai proses diversifikasi produk berbasis ikan, khususnya pengolahan ikan Lomek sebagai komoditas utama di perairan Dumai menjadi inovasi produk cemilan sehat yang dan bernilai jual tinggi sehingga dapat menstimulasi kreativitas generasi Z dalam mengembangkan produk olahan perikanan dan kelautan yang unik, sehat, dan sesuai dengan tren pasar. Dalam kegiatan ini beberapa materi disampaikan oleh berbagai narasumber, yaitu: Akses dan Promosi Pasar Dalam Negeri (Direktorat Akses dan Inovasi), Produk Unggulan Politeknik KP Dumai (Politeknik KP Dumai), Praktik Pengolahan Fishchips (Politeknik KP Dumai), Analisa Usaha *Fishchips*. Peserta workshop yang mengikuti praktik di kedudukan antara lain UKM Poklahsar Wanita Berkarya Pare Pare.



Gambar 30. Kegiatan Ngolah Ikan Bersama Gen Z Politeknik KP Dumai

3. Pengenalan Produk UMKM Kelautan dan Perikanan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2026, dilaksanakan secara *hybrid* di Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar, Bogor. Kegiatan dibuka oleh Direktur Pengolahan dan dihadiri sebanyak 280 orang, terdiri dari 240 peserta daring dan 40 peserta luring. Peserta yang hadir meliputi perwakilan dari perbankan, Dinas Provinsi Kab/Kota, Kepala Wilayah Provinsi, Perwakilan KPPG, Perwakilan SPPG, yayasan, dan pelaku usaha/UMKM produk perikanan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan penyampaian materi dan pengenalan produk kelautan dan perikanan kepada SPPG, selanjutnya dilakukan diskusi. Materi yang disampaikan yaitu Diversifikasi dan Inovasi Produk Pangan oleh Direktorat Pengolahan, dilanjutkan materi Akses Pasar Dalam Negeri oleh Direktorat Aksi, serta Akses Permodalan oleh Direktorat Pemberdayaan Usaha. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan paparan produk olahan ikan dari UMKM yang hadir luring sebagai bentuk promosi dan penajakan kerja sama dengan SPPG. Kegiatan ini memiliki respon positif dari SPPG, Yayasan dan KPPG untuk membangun kolaborasi dan sinergi penyediaan bahan baku untuk mendukung MBG.

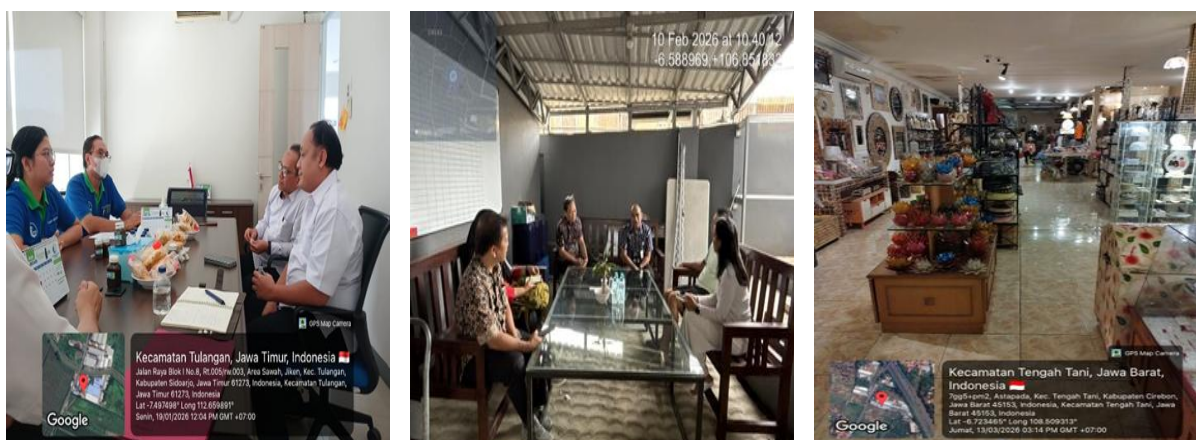


Gambar 31. Pengenalan Produk UMKM Kelautan dan Perikanan kepada SPPG

4. Pembinaan Diversifikasi Produk Bernilai Tambah Non Pangan

Kegiatan dilaksanakan selama bulan Januari s.d. Maret 2026, dilaksanakan di beberapa daerah (Jawa Timur, Jawa Barat, dan Kota Padang). Kegiatan ini diikuti

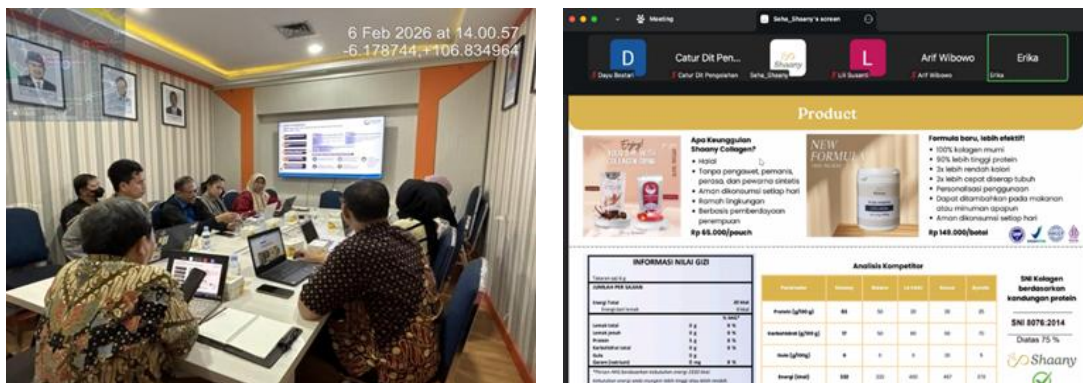
oleh perwakilan pelaku usaha dari Jawa Timur, Jawa Barat, dan Kota Padang. Dilaksanakan di berbagai lokasi, yaitu : Jawa Timur (CV. Shaany Inovasi Berkah, PT. Matahari Sakti, PT. Maqpro Biotech Indonesia, dan PT. Surya Indoalgas), Jawa Barat (Unit Aquascape, Rumah Rumput Laut, dan Istana Kerajinan Kerang Multi Dimensi) dan Kota Padang (CV. Nutri Pro dan Multi Daya Jaya). Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah pembinaan, identifikasi, dan pemetaan pelaku usaha produk non pangan pada Unit Penanganan dan Pengolahan Hasil Perikanan Non Pangan. Kegiatan ini mendukung upaya Direktorat Pengolahan dalam pengembangan Unit Pengolahan Produk Non Pangan (UPPN), meningkatkan nilai tambah hasil kelautan dan perikanan, serta memanfaatkan hasil samping perikanan dalam kerangka ekonomi sirkular. Ke depan, pembinaan akan difokuskan pada peningkatan kualitas produk, inovasi desain, dan pengembangan promosi produk kerajinan berbasis hasil samping perikanan agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Dukungan kebijakan lintas sektor dan koordinasi antar lembaga sangat diperlukan untuk meningkatkan keberlanjutan industri ini. Penguatan hilirisasi dan diversifikasi produk non pangan tidak hanya memerlukan kesiapan industri pengolahan, tetapi juga dukungan kebijakan lintas sektor, khususnya terkait ketersediaan bahan baku, kepastian regulasi, dan sinergi hulu–hilir. Bagi Direktorat Pengolahan, hasil kunjungan lapangan ini menjadi bahan penting dalam perumusan kebijakan pembinaan ke depan, termasuk dalam mendorong koordinasi lintas kementerian/lembaga, fasilitasi kepastian perizinan bagi produk hilirisasi non pangan, serta penguatan integrasi hulu–hilir pengolahan rumput laut guna menjaga keberlanjutan industri pengolahan dalam negeri.



Gambar 32. Pembinaan Diversifikasi Produk Bernilai Tambah Non Pangan melalui Kunjungan Lapang yang dilaksanakan selama periode Triwulan I

5. Rapat Penguatan Produk Non Pangan Sebagai Tindak Lanjut atas Hasil Kunjungan Lapangan di CV. Shaany Inovasi Berkah

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2026, dilaksanakan secara *hybrid* di Ruang Rapat Lt. 12A GMB 3. Kegiatan dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat Pemasaran, Direktorat Pemberdayaan Usaha, Tim kerja humas dan kerjasama setditjen PDSPKP, Tim kerja lingkup Direktorat dan CV. Shaany Inovasi Berkah. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah Dalam rangka tindak lanjut atas hasil kunjungan lapangan di CV. Shaany Inovasi Berkah, Kabupaten Probolinggo. dukungan yang dapat diberikan. Agenda pembahasan mencakup penyampaian hasil kunjungan lapang, perumusan rencana tindak lanjut, serta identifikasi sinergi lintas unit. Dalam diskusi awal yang berkembang, hilirisasi non pangan dipandang memiliki nilai strategis karena mampu mendorong diversifikasi pemanfaatan hasil perikanan, mengurangi limbah, serta memperkuat transformasi sektor perikanan menuju industri bernilai tambah. Selain itu, penguatan branding hilirisasi juga dinilai dapat meningkatkan citra program pemerintah di bidang nilai tambah perikanan dan memberikan efek pengganda bagi sektor hulu–hilir.



Gambar 33. Rapat Penguatan Produk Non Pangan Sebagai Tindak Lanjut atas Hasil Kunjungan Lapangan di CV. Shaany Inovasi Berkah

6. Pembahasan Teknis Pendataan Dan Koordinasi Pengisian Kuisioner Unit Penanganan dan Pengolahan Hasil Perikanan Non Pangan (UPHPN)

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2026, dilaksanakan secara luring di R.R. Lt. 12A GMB 3. Kegiatan dihadiri oleh perwakilan dari Pusat Data dan Informasi, KKP; Timja Data PDS; perwakilan Tim Kerja Lingkup Direktorat Pengolahan. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah dilatarbelakangi oleh kebutuhan mendesak untuk memperkuat basis data produk kelautan dan perikanan non pangan sebagai bagian

dari agenda hilirisasi dan peningkatan nilai tambah sebagaimana amanat Asta Cita Presiden, RPJMN KKP 2024–2029, Permen KP Nomor 59 Tahun 2021, Permen KP Nomor 14 Tahun 2021, serta Keputusan Menteri KP Nomor 119 Tahun 2021 tentang Data Induk Produk KP yang memuat 82 produk non pangan dalam empat jenis kegiatan utama. Data UPHPN yang tersedia di Portal KUSUKA belum sepenuhnya mencerminkan ragam produk, peruntukan, hasil samping, serta variasi satuan produksi (kapsul, tablet, momme, pieces, liter, bundel, dll.). Model agregasi berbasis kilogram tidak sepenuhnya relevan untuk produk non pangan. Produk non pangan memiliki potensi margin lebih tinggi dibanding produk pangan konvensional, khususnya pada sektor kosmetik, farmasi, dan biomaterial. Namun hingga saat ini belum tersedia profiling komprehensif yang dapat digunakan untuk promosi investasi atau perumusan kebijakan hilirisasi. Terdapat irisan substansi dengan Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (PRL), khususnya pada biofarmakologi dan pemanfaatan biota laut non konsumsi. Di lapangan, pelaku usaha sering mengalami kebingungan pembinaan dan sertifikasi lintas sektor (cth. biostimulan, biofarmakologi, pupuk, kosmetik). Sebagian besar produk non pangan memerlukan standar dan sertifikasi di luar lingkup KKP (cth. kosmetik, farmasi, pupuk). Tanpa data legalitas (NIB, KBLI, sertifikat standar, GMP/SKP, Halal, HACCP, MD/ML, dll), Direktorat Pengolahan akan kesulitan merancang skema fasilitasi yang tepat.



Gambar 34. Pembahasan Teknis Pendataan Dan Koordinasi Pengisian Kuisioner UPHPN

7. Webinar bertema “*Waste to Value – Solutions for Shrimp By-Products*”

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2026, dilaksanakan secara daring melalui *Zoom Meeting* dan *streaming youtube*. Kegiatan diikuti sebanyak 200 peserta melalui *Zoom Meeting* dan melalui *livestreaming youtube*. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah karena udang sebagai salah satu komoditas strategis nasional dengan kontribusi signifikan terhadap ekspor perikanan Indonesia. Pemerintah,

melalui kebijakan ekonomi biru yang sejalan dengan Asta Cita, tidak hanya fokus pada peningkatan produksi namun juga keberlanjutan lingkungan. Pemanfaatan kepala, kulit, dan bagian udang lainnya yang selama ini terbuang diharapkan dapat menjadi produk bernilai tambah adalah hal yang mungkin dikembangkan. KKP berharap pembelajaran dari Vietnam pada webinar ini dapat mempercepat terwujudnya kerjasama tersebut di Indonesia. Pemanfaatan produk samping perikanan dapat menjadi salah satu materi dalam kegiatan pembinaan diversifikasi produk dan peningkatan nilai tambah hasil perikanan, sehingga industri pengolahan tidak hanya berorientasi pada produk utama, tetapi juga mampu mengoptimalkan seluruh bagian bahan baku secara lebih produktif dan berkelanjutan.



Gambar 35. Webinar bertema “Waste to Value – Solutions for Shrimp By-Products”

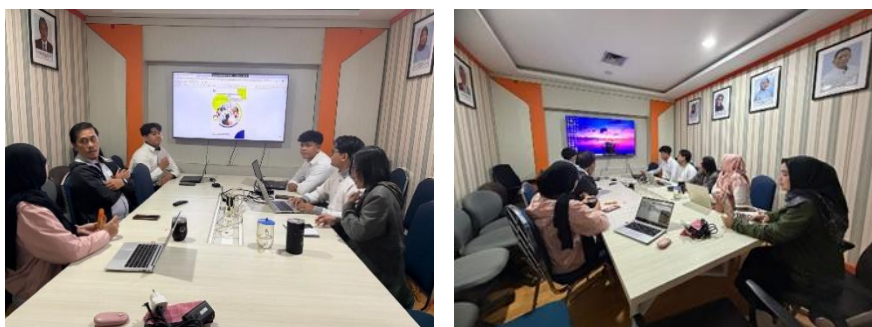
C. Pembinaan Unit Penanganan dan Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan Skala Mikro dan Kecil

Kegiatan Pembinaan Unit Penanganan dan Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan Skala Mikro dan Kecil merupakan bentuk usaha pembinaan terkait kelayakan dasar pengolahan bagi UPI skala mikro dan kecil yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran terkait pentingnya jaminan mutu dan keamanan pangan bagi masyarakat dan pelaku usaha bidang perikanan. Pada triwulan I kegiatan ini memiliki capaian sebanyak 50 UMKM atau setara 13,33% dari target tahun 2026 yaitu sebesar 375 UMKM. Berdasarkan hasil pembinaan terhadap 50 UMKM, sebaran pelaku usaha per provinsi menunjukkan bahwa pembinaan masih didominasi oleh wilayah Pulau Jawa, khususnya Jawa Barat (17 UMKM) dan DKI Jakarta (13 UMKM). Selanjutnya diikuti oleh Jawa Tengah (5 UMKM) dan Jawa Timur (3 UMKM). Sementara itu, provinsi lainnya memiliki jumlah yang lebih terbatas, yaitu Banten (2 UMKM), Kepulauan Bangka Belitung (2 UMKM), Sulawesi Tengah (2 UMKM), dan Sulawesi Tenggara (2 UMKM). Adapun

provinsi dengan masing-masing 1 UMKM meliputi Lampung, Bengkulu, Nusa Tenggara Barat, dan DI Yogyakarta. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan telah menjangkau berbagai wilayah di Indonesia, meskipun masih perlu ditingkatkan pemerataannya di luar Pulau Jawa. Dari sisi produk, mayoritas UMKM yang dibina masih didominasi oleh produk olahan tradisional berbasis ikan, seperti ikan asin, pindang, abon ikan, dan terasi. Selain itu, terdapat pula produk olahan siap konsumsi seperti pempek, siomay, otak-otak, bakso ikan, dan nugget ikan, serta produk camilan seperti kerupuk ikan dan amplang. Beberapa UMKM juga telah mengembangkan produk berbasis rumput laut dan produk setengah jadi seperti fillet ikan dan ikan segar, meskipun jumlahnya masih terbatas. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung Pembinaan Unit Penanganan dan Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan Skala Mikro dan Kecil, yaitu:

1. Rapat Review SOP Pembinaan Pengolahan

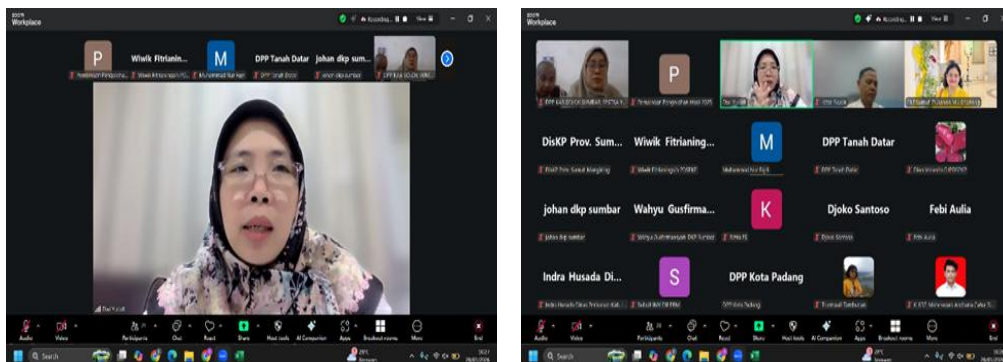
Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2026, dilaksanakan secara *hybrid* melalui *Zoom Meeting*. Kegiatan dihadiri oleh Ketua dan Anggota Tim Kerja Pembinaan Pengolahan Hasil (Timja PPH) lingkup Direktorat Pengolahan yang terlibat dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan pengolahan hasil perikanan. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah menyusun pedoman, mengidentifikasi pelaku usaha, meningkatkan akurasi data, dan mendukung perencanaan program yang tepat sasaran. Kegiatan review SOP diadakan untuk memulai penyusunan pedoman pembinaan pengolahan hasil perikanan tahun 2026. Dalam rapat ini, revisi SOP tahun 2025 menjadi SOP tahun 2026 dibahas, termasuk kebijakan, target kerja, dan kegiatan yang akan dilakukan. Juga dibahas kegiatan pembinaan skala mikro dan kecil, seperti Klinik Mutu Perikanan, pembinaan UPI, dan pusat pengolahan untuk program Kampung Nelayan Merah Putih, serta monitoring dan evaluasi.



Gambar 36. Rapat Review SOP Pembinaan Pengolahan

2. Rapat Koordinasi Verifikasi Data Pelaku Usaha Pascabencana Sumatera

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2026, dilaksanakan secara *hybrid* di R.R. Lt. 12A GMB 3. Kegiatan dihadiri oleh perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, Dinas Kabupaten/Kota terkait, perwakilan Setditjen PDSPKP, serta Tim Kerja di lingkungan Direktorat Pengolahan. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah verifikasi dan validasi data pelaku usaha pengolahan perikanan yang terdampak bencana di Sumatera, sebagai dasar penyaluran bantuan pemerintah. Dalam kegiatan dilakukan pembahasan terkait kebutuhan data akurat, identitas pelaku usaha, jenis usaha, tingkat kerusakan, dan estimasi kerugian. Diharapkan Pemerintah Daerah dapat berperan dalam melakukan verifikasi lapangan. Persyaratan penerima bantuan mencakup keharusan tergabung dalam kelompok (Poklasar) dan terdaftar di KUSUKA. Isu yang dihadapi termasuk data yang belum lengkap dan beberapa pelaku usaha yang belum tergabung dalam kelompok. Tindak lanjut termasuk penyusunan kuesioner resmi dan fasilitasi pembentukan kelompok.



Gambar 37. Rapat Koordinasi Verifikasi Data Pelaku Usaha Pascabencana Sumatera

3. Rapat Koordinasi Sinkronisasi Data Pelaku Pengolahan Perikanan

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2026, dilaksanakan secara luring di R.R. Lt. 12A GMB 3. Kegiatan dihadiri oleh Direktur Pengolahan, perwakilan Tim Data dan Pelayanan Publik Setditjen PDSPKP, Direktorat Pemberdayaan Usaha, serta perwakilan Tim Kerja lingkup Direktorat Pengolahan. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk menyelaraskan dan mengintegrasikan data pelaku usaha pengolahan perikanan dari berbagai sumber, termasuk KUSUKA, program KNMP, budidaya

tematik, serta hasil kurasi usaha. Data UPI menjadi dasar dalam perencanaan pembinaan yang terarah dan berkelanjutan, diperlukan basis data yang akurat. Kegiatan pembinaan UPI mendukung program prioritas nasional seperti Kampung Nelayan Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis. Permasalahan yang dihadapi adalah data yang belum terintegrasi dan perlu standar seragam dalam pengumpulan data. Disepakati untuk melakukan sinkronisasi dan integrasi data lintas sistem.

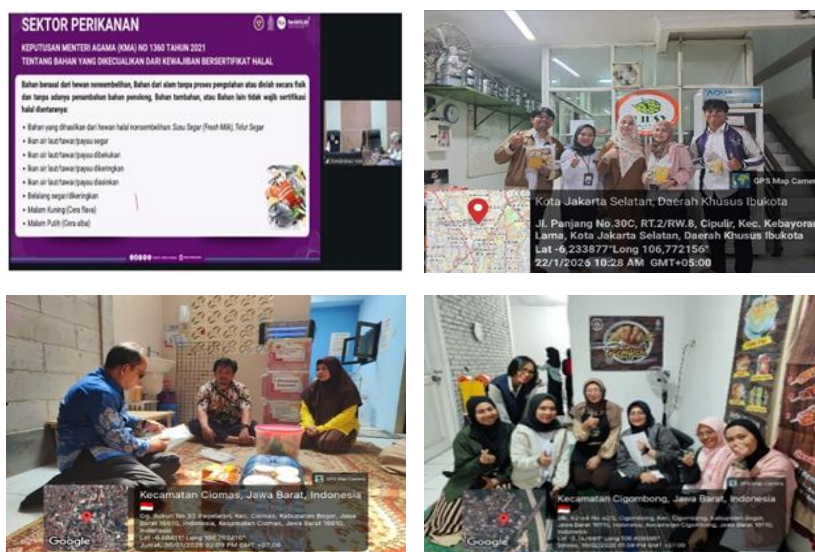


Gambar 38. Rapat Koordinasi Sinkronisasi Data Pelaku Pengolahan Perikanan

4. Pembinaan Unit Pengolahan Ikan (UPI) Skala Menengah dan Besar

Kegiatan dilaksanakan selama bulan Januari s.d. Maret 2026, dilaksanakan di beberapa daerah (CV. Siomay Chipsy, Jakarta Selatan; UPI skala mikro dan kecil Pempek Buhaga Kitchen dan Pempek Homekoechi, Kab. Bogor; UPI Zulfa's Kitchen, Kab. Bogor; PT. Sauri Unggul, Kab. Bogor; KDMP Kebon Agung, Kab. Probolinggo; KDMP Kabupaten Blora, Kab. Blora). Kegiatan dihadiri oleh Tim Direktorat Pengolahan, perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan, pembina mutu hasil perikanan, penyuluh perikanan, pelaku usaha UPI, tenaga kerja, dan pengelola kawasan serta kelompok budidaya ikan. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja UPI dengan menerapkan standar mutu dan keamanan pangan, mendorong legalitas usaha, serta mengidentifikasi permasalahan yang ada di lapangan. Pembinaan melalui kunjungan langsung pada UPI skala menengah dan besar menunjukkan bahwa secara umum unit usaha telah memiliki kapasitas produksi dan fasilitas yang relatif memadai, serta sebagian telah memenuhi aspek legalitas dan standar mutu dasar. Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, khususnya dalam konsistensi penerapan sistem

jaminan mutu seperti GMP, SSOP, dan HACCP, optimalisasi tata letak produksi, serta penguatan sistem rantai dingin dan efisiensi proses produksi. Selain itu, pada pembinaan di kawasan seperti KNMP dan KDMP, ditemukan bahwa integrasi antara kegiatan budidaya, pengolahan, dan pemasaran belum berjalan optimal, sehingga potensi nilai tambah belum dimanfaatkan secara maksimal. Beberapa kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan sarana pengolahan, belum optimalnya kapasitas SDM, serta belum terbangunnya kemitraan usaha yang kuat dengan pasar, termasuk untuk mendukung program prioritas seperti SPPG. Sebagai tindak lanjut, diperlukan pembinaan lanjutan yang lebih terarah dan berkelanjutan, meliputi pendampingan teknis penerapan sistem mutu, peningkatan kapasitas SDM, perbaikan sarana dan prasarana produksi, serta penguatan kemitraan usaha. Selain itu, perlu dilakukan integrasi yang lebih baik antara sektor hulu dan hilir untuk memastikan keberlanjutan rantai pasok dan peningkatan daya saing produk hasil perikanan.

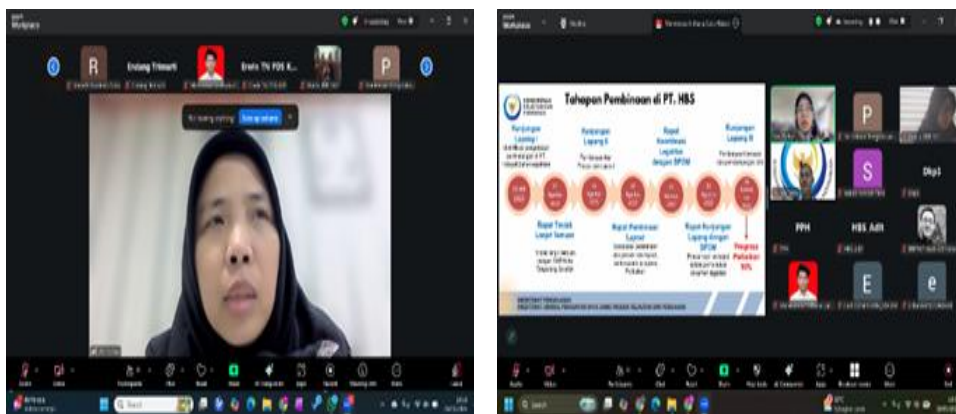


Gambar 39. Pembinaan Unit Pengolahan Ikan (UPI) Skala Menengah dan Besar

5. Pembinaan Hasil Uji Laboratorium Produk Pindang dan Pendampingan pemenuhan SNI PT. Hidayat Bahari Sejahtera (PT. HBS)

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2026, dilaksanakan secara daring melalui *zoom meeting*. Kegiatan dihadiri oleh Tim Direktorat Pengolahan, pelaku usaha Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala mikro dan kecil yang menjadi objek pembinaan, serta perwakilan instansi terkait seperti Dinas Kelautan dan Perikanan daerah dan unit teknis pendukung. Selain itu, pada kegiatan tertentu juga melibatkan

stakeholder lain seperti laboratorium pengujian, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta pihak pendamping teknis yang berperan dalam proses pemenuhan standar mutu, legalitas usaha, dan sertifikasi produk. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui media komunikasi virtual sehingga memungkinkan partisipasi peserta dari berbagai wilayah secara efektif dan efisien. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk pendampingan pemenuhan Standar Nasional Indonesia (SNI) produk ikan pindang. Pembangunan fasilitas produksi sedang berlangsung, tetapi ada bagian yang belum selesai dan perlu penyesuaian. Dokumen juga belum lengkap, termasuk dokumen teknis dan hasil uji laboratorium. Masalah utama adalah keterlambatan fasilitas produksi, kendala pengujian laboratorium, dan kurangnya pemahaman SNI. Tindak lanjut yang diperlukan termasuk mempercepat fasilitas dan pengujian, serta meningkatkan koordinasi untuk proses sertifikasi SNI.



Gambar 40. Pembinaan Hasil Uji Laboratorium Produk Pindang dan Pendampingan pemenuhan SNI PT. Hidayat Bahari Sejahtera (PT. HBS)

6. Workshop Pendampingan Proses Produk Halal (P3H)

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2026, dilaksanakan secara *hybrid* di R.R. Lt. 12A GMB 3. Kegiatan dihadiri oleh Direktur Pengolahan, perwakilan SMESCO Indonesia, Ketua Tim Kerja dan staf Direktorat Pengolahan yang telah memiliki Nomor Register Pendampingan Proses Produk Halal (P3H), serta perwakilan dari unit kerja lainnya di lingkungan KKP. Jumlah peserta yang hadir dalam kegiatan ini sebanyak 72 orang. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk pendampingan pemahaman mendalam tentang Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan regulasi terbaru dan untuk menyelaraskan persepsi mengenai kriteria produk yang wajib bersertifikat halal dan tata cara pengajuannya. Kegiatan Workshop Praktek

Pendampingan Proses Produk Halal (P3H) telah dilaksanakan dengan baik dan berjalan lancar dengan tingkat partisipasi peserta yang tinggi. Kegiatan ini memberikan pemahaman dan pengalaman praktis kepada peserta dalam melakukan pendampingan penerbitan NIB dan sertifikat halal. Meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan, kegiatan ini menjadi langkah awal yang penting dalam mendukung peningkatan kapasitas pendamping serta percepatan pemenuhan legalitas usaha dan sertifikasi halal bagi pelaku usaha pengolahan hasil perikanan.



Gambar 41. Workshop Pendampingan Proses Produk Halal (P3H)

7. Pembinaan dan Pendampingan Izin Edar MD CV. Cindy Group

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2026, dilaksanakan secara *hybrid* di R.R. Lt. 12A GMB 3. Kegiatan dihadiri oleh Tim Direktorat Pengolahan, pelaku usaha Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala mikro dan kecil yang menjadi objek pembinaan, serta perwakilan instansi terkait seperti Dinas Kelautan dan Perikanan daerah dan unit teknis pendukung. Selain itu, pada kegiatan tertentu juga melibatkan stakeholder lain seperti laboratorium pengujian, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta pihak pendamping teknis yang berperan dalam proses pemenuhan standar mutu, legalitas usaha, dan sertifikasi produk. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui media komunikasi virtual sehingga memungkinkan partisipasi peserta dari berbagai wilayah secara efektif dan efisien. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah mendukung pelaku usaha dengan meningkatkan pemahaman standar mutu dan keamanan pangan, memenuhi legalitas usaha, memberikan konsultasi, mempercepat proses pembinaan, dan menjaga kesinambungan pembinaan. Pembinaan dilakukan untuk mendukung pemenuhan izin edar MD BPOM. Beberapa persyaratan belum terpenuhi, termasuk kondisi bangunan dan fasilitas produksi. SKP perlu diperbarui, dan terdapat kekurangan dalam dokumen mutu dan keamanan pangan. Diperlukan

perbaikan fasilitas, pembaruan SKP, pendampingan dokumen, dan koordinasi dengan BPOM.



Gambar 42. Pembinaan dan Pendampingan Izin Edar MD CV. Cindy Group

8. Klinik Mutu pada Bazar Perikanan KKP

Kegiatan dilaksanakan secara rutin selama Triwulan I Tahun 2026, bertempat di lapangan parkir Gedung Mina Bahari III. Kegiatan dihadiri oleh pelaku usaha pengolahan hasil perikanan (UMKM/tenant bazar), masyarakat umum sebagai pengunjung kegiatan bazar, serta stakeholder terkait yang berinteraksi melalui layanan konsultasi langsung maupun media sosial. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha serta masyarakat terhadap pentingnya penerapan mutu dan keamanan pangan hasil kelautan dan perikanan dan untuk memberikan layanan edukasi, konsultasi, dan pendampingan kepada pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu, legalitas usaha, serta meningkatkan daya saing produk perikanan secara berkelanjutan. Kegiatan bazar memberikan dampak langsung melalui edukasi, konsultasi, dan pemantauan mutu produk di lapangan, sedangkan edukasi melalui media sosial mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas dengan penyampaian informasi yang menarik dan mudah dipahami. Di sisi lain, perencanaan pengembangan Website Klinik Mutu menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem layanan informasi dan edukasi berbasis digital yang terintegrasi dan berkelanjutan.



Gambar 43. Klinik Mutu pada Bazar Perikanan KKP

Terlaksananya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya lingkup Direktorat Pengolahan

IK 3. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pengolahan

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh unit kerja Direktorat Pengolahan sampai dengan waktu pengukuran.

Tabel 5. Ikhtisar Pencapaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pengolahan

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I 2026	% Realisasi s.d. TW I Terhadap Target 2026	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2026	TW IV 2025	TW I 2025	Tahun 2026	TW I 2026	TW IV 2025	TW I 2025	s.d. TW I 2026			TW IV 2025	TW I 2026
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pengolahan	95	95	95	95	99,40	100,00	100,00	99,40	104,63	104,63	-	-

Berdasarkan data capaian indikator kinerja *Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pengolahan*, realisasi kinerja pada riwulan I tahun 2026 tercatat sebesar 99,40. Merupakan indikator

lanjutan pada tahun 2025 sehingga dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2025, indikator kinerja tersebut dilaporkan secara triwulanan. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan (95), maka capaian ini telah melampaui target dengan persentase realisasi terhadap target sebesar 104,63%. Pada periode yang sama di tahun sebelumnya (TW I 2025), realisasi mencapai angka 100,00, terdapat sedikit penurunan sebesar 0,60 poin pada TW I 2026. Capaian pada akhir tahun 2025 juga tercatat sebesar 100,00.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pengolahan pada Triwulan I 2026, antara lain: melakukan pengisian pemenuhan dokumen temuan pada aplikasi Sidak, melakukan monitoring lapangan sesuai dengan rekomendasi sebagai bentuk dari tindak lanjut temuan. Sementara itu belum ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini.

IK 4. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Direktorat Pengolahan

Jumlah nilai temuan hasil pemeriksaan BPK atas penggunaan anggaran pada laporan keuangan Direktorat Pengolahan Tahun 2025 yang telah ditindak lanjuti dibanding jumlah nilai temuan hasil pemeriksaan BPK atas penggunaan anggaran pada laporan keuangan Direktorat Pengolahan Tahun 2025.

Tabel 6. Ikhtisar Pencapaian Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Direktorat Pengolahan

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I 2026	% Realisasi s.d. TW I Terhadap Target 2026	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2026	TW IV 2025	TW I 2025	Tahun 2026	TW I 2026	TW IV 2025	TW I 2025	s.d. TW I 2026			TW IV 2025	TW I 2026
Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Direktorat Pengolahan	-	100	-	100	-	100	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan data capaian indikator kinerja *Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Direktorat Pengolahan*, belum terdapat realisasi pada Triwulan I tahun 2026. Hal ini dikarenakan mekanisme pelaporan indikator tersebut bersifat tahunan, sehingga capaiannya baru akan tersedia pada Triwulan IV. Kondisi ini serupa dengan IK

Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Direktorat Pengolahan pada tahun 2025 yang juga belum mencatatkan capaian di triwulan pertama. Target yang ditetapkan untuk tahun 2026 tidak mengalami perubahan dari tahun 2025, yaitu tetap sebesar 100%.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pengolahan antara lain:

1. Pemenuhan Dokumen Tindak Lanjut Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK di Lingkungan Direktorat Pengolahan;
2. Melakukan monitoring lapangan sesuai dengan rekomendasi sebagai bentuk dari tindak lanjut temuan. Sementara itu belum ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini.

IK 5. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Pengolahan

Indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Nilai PM SAKIP Unit Eselon I dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian dirilis melalui surat dari Inspektorat Jenderal.

Tabel 7. Ikhtisar Pencapaian Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Pengolahan

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I 2026	% Realisasi s.d. TW I Terhadap Target 2026	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2026	TW IV 2025	TW I 2025	Tahun 2026	TW I 2026	TW IV 2025	TW I 2025	s.d. TW I 2026			TW IV 2025	TW I 2026
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Pengolahan	-	86	-	86,20	-	87,20	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan data capaian indikator kinerja *Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Pengolahan*, belum terdapat realisasi pada Triwulan I tahun 2026. Hal ini dikarenakan mekanisme pelaporan indikator tersebut bersifat tahunan, sehingga capaiannya baru akan tersedia pada Triwulan IV. Kondisi ini serupa dengan IK *Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Pengolahan* pada tahun 2025 yang juga belum mencatatkan capaian di triwulan pertama. Adapun target tahun 2026 mengalami peningkatan sebesar 0,2 poin menjadi 86,2%, dibandingkan target tahun 2025 yang sebesar 86%.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Di Lingkungan Direktorat Pengolahan pada Triwulan I Tahun 2026, antara lain:

1. Pengisian Evaluasi Rencana Aksi Level 1 dan 2 lingkup Ditjen PDSPKP periode triwulan IV Tahun 2025, dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2026.
2. Pengisian Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi lingkup Ditjen PDSPKP periode triwulan IV Tahun 2025, dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 2026.
3. Penyusunan draft LKJ Level I dan II lingkup Ditjen PDSPKP periode triwulan IV Tahun 2025, dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2026.
4. Verifikasi Capaian Kinerja pada aplikasi kinerjaku lingkup Ditjen PDSPKP periode triwulan IV Tahun 2025, dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2026.

IK 6. Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengolahan

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Tabel 8. Ikhtisar Pencapaian Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengolahan

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I 2026	% Realisasi s.d. TW I Terhadap Target 2026	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2026	TW IV 2025	TW I 2024	Tahun 2026	TW I 2026	TW IV 2025	TW I 2025	s.d. TW I 2026			TW IV 2025	TW I 2025
Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengolahan	-	81	-	81,5	-	85,97	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan data capaian indikator kinerja *Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengolahan*, belum terdapat realisasi pada Triwulan I tahun 2026. Hal ini dikarenakan mekanisme pelaporan indikator tersebut bersifat semesteran, sehingga capaiannya baru akan tersedia pada Triwulan II. Kondisi ini serupa dengan IK *Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengolahan* pada tahun 2025 yang juga belum mencatatkan capaian di triwulan pertama. Adapun target tahun 2026 mengalami peningkatan sebesar 0,5 poin menjadi 86,5%, dibandingkan target tahun 2025 yang sebesar 81%.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Dilingkungan Direktorat Pengolahan pada triwulan IV antara lain:

1. Melakukan pemantauan nilai IP ASN Organisasi,
2. Melakukan penginputan sertifikat dari kegiatan diklat maupun pelatihan yang telah diikuti oleh seluruh pegawai pada aplikasi e-pegawai,
3. Melakukan rekap data pegawai yang telah mengikuti diklat maupun pelatihan.

IK 7. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Pengolahan

Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang membuat kondisi factual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan.

Tabel 9. Ikhtisar Pencapaian Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Pengolahan

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I 2026	% Realisasi s.d. TW I Terhadap Target 2026	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2026	TW IV 2025	TW I 2024	Tahun 2026	TW I 2026	TW IV 2025	TW I 2025	s.d. TW I 2026			TW IV 2025	TW I 2025
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Pengolahan	-	-	-	75	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan data capaian Indikator Kinerja (IK) *Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Pengolahan*, belum terdapat realisasi pada Triwulan I tahun 2026. Hal ini dikarenakan mekanisme pelaporan indikator tersebut bersifat tahunan, sehingga angka capaian baru akan tersedia pada Triwulan IV. Mengingat ini merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan pada tahun 2026 dengan target sebesar 75 dalam kerangka Renstra 2025-2029, maka realisasinya belum dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya maupun periode yang sama pada tahun lalu.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Pengolahan pada triwulan I antara lain:

1. Menghadiri Bimbingan teknis Pengelolaan SIKN dan JIKN, dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2026.
2. Menghadiri Bimtek Pendalaman materi pengawasan kearsipan tahun 2026, dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2026.
3. Menghadiri Webinar Penerapan Penyusutan arsip berdsarkan Jadwal Retensi Arsip (JRA) di Lingkungan KKP, dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2026.

3.3. Realisasi Anggaran

Berdasarkan surat dari Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-1104/AG/AG.3/2025 tanggal 24 Desember 2025 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan serta berdasarkan Perjanjian Kinerja tertanggal 6 Januari 2026, Direktorat Pengolahan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 5.943.502.000,- dengan realisasi sampai dengan akhir Maret 2026 sebesar Rp 971.611.545,- atau setara dengan 16,35%. Direktorat Pengolahan dapat

melakukan efisiensi anggaran dimana realisasi NKO sebesar 104,63% dibandingkan dengan realisasi anggaran sebesar 16,35 sehingga terdapat efisiensi sebesar 88,28%.

Tabel 10. Realisasi Anggaran Direktorat Pengolahan Triwulan I 2026

No	Rincian Output	Pagu	Sisa Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran
1	Persentase Utilitas industri pengolahan produk KP	1.120.493.000	918.303.400	18,04%
2	Volume Produksi Olahan Kelautan dan Perikanan	4.823.009.000	4.053.587.055	15,95%

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Capaian kinerja Triwulan I Tahun 2026 merupakan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Pengolahan pada periode Januari hingga Maret 2026. Berdasarkan aplikasi Kinerjaku, nilai pencapaian sasaran strategis pada Triwulan I Tahun 2026 tercatat sebesar 104,63%. Jika dibandingkan dengan realisasi pada akhir tahun 2025, terdapat kenaikan sebesar 2,92 poin (dari 101,71). Namun, jika dibandingkan secara *Year-on-Year* (YoY) dengan capaian Triwulan I 2025 sebesar 105,09, terdapat penurunan tipis sebesar 0,46 poin. Meskipun mengalami sedikit penurunan secara tren tahunan, posisi capaian pada grafik tetap berada di Zona Hijau (Kategori Baik). Pencapaian nilai kinerja organisasi periode sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 diperoleh dari indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

- IKK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pengolahan (%); target 95%; capaian 99,40% atau 104,63% dari target.

Akhirnya, kehadiran Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan Triwulan I Tahun 2026 ini diharapkan dapat menjadi pertanggungjawaban tertulis kepada pemberi wewenang serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan sehingga terbentuknya pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu, Laporan Kinerja ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.

4.2. Permasalahan dan Rekomendasi

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian pada triwulan I 2026, yaitu:

Indikator Kinerja	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
Persentase Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan	• Terdapat berbagai metode penghitungan susut hasil perikanan yang digunakan oleh berbagai instansi, namun hingga kini belum terintegrasi dan belum memiliki metodologi baku di tingkat nasional. • Belum terlaksananya penetapan petugas enumerator dan validator oleh Pusdatin untuk kegiatan pendataan produksi tahun anggaran 2026.	• Direktorat Pengolahan akan melakukan koordinasi lanjutan dengan Tim Susut Hasil guna menetapkan ruang lingkup, metodologi, lini masa (<i>timeline</i>), serta aspek teknis terkait lainnya. • Melakukan koordinasi intensif dengan Pusdatin untuk mendorong percepatan penetapan petugas enumerator dan validator di tingkat Provinsi serta Kabupaten/Kota.

4.3. Tindak Lanjut Rekomendasi Pada Laporan Kinerja Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Sementara itu, rekomendasi pada Laporan Kinerja triwulan IV tahun 2025 yang telah ditindak lanjuti sebagai berikut :

Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut pada Triwulan IV Tahun 2025	Tindak Lanjut
• Melakukan analisis lebih mendalam untuk mengidentifikasi tren dan anomali data, guna mendukung akurasi dan validitas penghitungan VPO • Melakukan koordinasi lanjutan dengan UPI dan Dinas dalam pendataan profiling FLW.	• Telah dilaksanakannya Koordinasi Persiapan Pendataan dan Penghitungan VPO Tahun 2025 dan 2026 melalui kegiatan Pembahasan Rencana Pelaksanaan Pendataan VPO UPI Tahun 2025 dan 2026

	dan Penetapan Populasi Unit Pengolahan Ikan (UPI) Skala Mikro dan Kecil Tahun 2025 • Telah dilaksanakannya koordinasi penghitungan susut hasil dengan tujuan sinergitas dan sinkronisasi penghitungan susut hasil perikanan tahun 2026 dengan unit kerja atau K/L terkait
--	--

Bukti tindak lanjut rekomendasi pada Laporan Kinerja triwulan I tahun 2026 dapat dilihat pada tautan SAKIP dengan folder Level 2 PBM (https://drive.google.com/drive/folders/1s1mcaf3_lvCvni55C1XQyhtSL8YM1q7J).

Kami berharap agar laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai media pertanggungjawaban kepada stakeholders dan pemacu peningkatan kinerja bagi organisasi Direktorat Pengolahan, Ditjen PDSPKP. Terima kasih kami sampaikan semoga laporan ini bermanfaat bagi para pembaca dalam memperkaya pengetahuan tentang pengolahan dan bina mutu di sektor kelautan dan perikanan. Laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam rangka perbaikan dan penyusunan kegiatan Direktorat Pengolahan selanjutnya. Namun kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kami mengharapkan saran dan masukan konstruktif dari pihak-pihak terka hit sebagai bahan perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan yang akan datang. Saran dapat disampaikan melalui email: direktoratpbm@gmail.com. Demikian atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

4.4. Lampiran



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 DIREKTORAT PENGOLAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Tri Aris Wibowo**
Jabatan : Direktur Pengolahan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : **Machmud**
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 6 Januari 2026

PIHAK KEDUA,
Plt. Direktur Jenderal Penguatan Daya
Saing Produk Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Machmud

PIHAK PERTAMA,
Direktur Pengolahan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tri Aris Wibowo

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DIREKTORAT PENGOLAHAN**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Meningkatnya Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan	1.	Persentase Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan (Persen)	68,90
2.	Meningkatnya Produksi Olahan Kelautan dan Perikanan	2.	Volume Produksi Olahan Perikanan (Juta Ton)	3,83
3.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	3.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pengolahan (Persen)	95
		4.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Direktorat Pengolahan (Persen)	100
		5.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Pengolahan (Nilai)	86,2
		6.	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengolahan (Indeks)	81,5
		7.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Pengolahan (Nilai)	75

Data Anggaran :

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	
Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	5.943.502.000
Total Anggaran Direktorat Pengolahan Tahun 2025	5.943.502.000

Jakarta, 6 Januari 2026

PIHAK KEDUA,
Plt. Direktur Jenderal Penguatan Daya
Saing Produk Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Machmud

PIHAK PERTAMA,
Direktur Pengolahan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tri Aris Wibowo